



DOKUMEN KURIKULUM

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAK SYARIAH UIN MALANG

2024



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 2039 Tahun 2024

Tentang

PENETAPAN

MATAKULIAH UMUM (MKU) DAN MATAKULIAH KEKHASAN UNIVERSITAS (MKKU)
BERBASIS ULUL ALBAB, MODERASI BERAGAMA, DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan yang sesuai dengan misi merdeka belajar yang dirumuskan oleh Universitas dalam kerangka pengembangan kurikulum, dipandang perlu menetapkan Matakuliah Umum (MKU) dan Matakuliah Kekhasan Universitas (MKKU) dan sebarannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Matakuliah Umum (MKU) dan Matakuliah Kekhasan Universitas (MKKU) di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1947);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam;
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03/PP.00.9/2769/2017 tentang Daftar dan Sebaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

 Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Teken : vbkimj

9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1260 Tahun 2020 tentang Pedoman Konsorsium Keilmuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3857 Tahun 2022 tentang Penetapan Matakuliah Umum (MKU) dan Matakuliah Kekhasan Universitas (MKKU) Berbasis Ulul Albab, Moderasi Beragama, dan Nilai-Nilai Antikorupsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1598 Tahun 2024 tentang Perubahan Nama Matakuliah Kekhasan Universitas (MKKU) Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MATAKULIAH UMUM (MKU) DAN MATAKULIAH KEKHASAN UNIVERSITAS (MKKU) BERBASIS ULUL ALBAB, MODERASI BERAGAMA, DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Pertama : Matakuliah Umum (MKU) dan Matakuliah Kekhasan Universitas (MKKU) adalah Matakuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa untuk mendapatkan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas;
- Kedua : Daftar dan sebaran Matakuliah Umum (MKU) dan Matakuliah Kekhasan Universitas (MKKU) sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Mei 2024
Rektor,



M. Zainuddin

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Direktur Pascasarjana.

Lampiran : Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 2039 Tahun 2024
Tanggal : 16 Mei 2024
Tentang :

MATAKULIAH UMUM (MKU) DAN MATAKULIAH KEKHASAN UNIVERSITAS (MKKU)
BERBASIS UUL ALBAB, MODERASI BERAGAMA, DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

A. Matakuliah Umum (MKU)

No	Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS	SMT
1.	24000011A01	Pancasila	2	1
2.	24000011A02	Kewarganegaraan	2	2
3.	24000011A03	Bahasa Indonesia	2	1/2

B. Matakuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

No	Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS	SMT
1.	24000011B01	Bahasa Arab Dasar	2	1
2.	24000011B02	Struktur dan Kosakata Arab	2	1
3.	24000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2	2
4.	24000011B04	Bahasa Arab Praktis	2	2
5.	24000011B05	Bahasa Inggris Umum	3	3
6.	24000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3	4
7.	24000011B07	Filsafat Ilmu	2	3
8.	24000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2	1
9.	24000011B09	Teosofi	2	3/4
10.	24000011B10	Studi al-Qur'an dan al-Hadits	2	1/2/3/4
11.	24000011B11	Studi Fiqih	2	3
12.	24000011B12	Kuliah Kerja Mahasiswa	2	5

Rektor,



M. Zainuddin

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 94 TAHUN 2025

TENTANG
KURIKULUM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : a. Bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa peningkatan kualitas dan sarana pelayanan akademik, maka perlu diterbitkan Kurikulum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu penetapan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Kurikulum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Kurikulum Fakultas Syariah Tahun 2025.

Pertama : Menetapkan Kurikulum Program Studi pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Kurikulum ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2025 dan angkatan selanjutnya;

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di kemudian akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 31 Januari 2025



Tembusan:

1. Kepala Biro AAKK;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua Program Studi.

Daftar Lampiran III Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 94 TAHUN 2025
Tanggal : 31 Januari 2025

Tentang :

**KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025**

A. Mata Kuliah Umum (MKU)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	24000011A01	Pancasila	2
2	24000011A02	Kewarganegaraan	2
3	24000011A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah SKS			6

B. Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	24000011B01	Bahasa Arab Dasar	2
2	24000011B02	Struktur dan Kosakata Arab	2
3	24000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2
4	24000011B04	Bahasa Arab Praktis	2
5	24000011B05	Bahasa Inggris Umum	3
6	24000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3
7	24000011B07	Filsafat Ilmu	2
8	24000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2
9	24000011B09	Teosofi	2
10	24000011B10	Studi al-Qur'an dan al-Hadits	2
11	24000011B11	Studi Fiqih	2
12	24000011B12	Kuliah Kerja Mahasiswa	2
Jumlah SKS			26

C. Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020311C01	Ulumul Qur'an dan Tafsir Ahkam	2
2	25020311C02	Ushul Fiqh	3
3	25020311C03	Fiqh Ibadah	2
4	25020311C04	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	25020311C05	Pengantar Hukum Indonesia	2
6	25020311C06	Hukum Tata Negara	2
Jumlah SKS			13

D. Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020311E01	Ulumul Hadist	2
2	25020311E02	Fiqh Muamalah	2
3	25020311E03	Fiqh Mawaris	2
4	25020311E04	Hukum Perdata	2
5	25020311E05	Hukum Pidana	2
6	25020311E06	Qawaid Fiqh Siyasah	2
7	25020311E07	Hadist Ahkam Siyasah	2
8	25020311E08	Hukum Acara Pidana	2
9	25020311E09	Hukum Acara Perdata	2
10	25020311E10	Peradilan Agama di Indonesia	2
11	25020311E11	Hukum Agraria	2
12	25020311E12	Metode Penelitian Hukum	3
13	25020311E13	Hukum Acara PTUN	2
14	25020311E14	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
15	25020311E15	Sosiologi Hukum	2
16	25020311E16	Syariah dan HAM	2
17	25020311E17	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	2
18	25020311E18	Hukum Lembaga Negara	2
19	25020311E19	Ilmu Negara	2
20	25020311E20	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
21	25020311E21	Hukum Konstitusi	2
22	25020311E22	Politik Hukum	2
23	25020311E23	Ilmu Perundang-Undangan	2
24	25020311E24	Hukum Administrasi Negara	2
25	25020311E25	Siyasah Dusturiyah	2
26	25020311E26	Siyasah Dauliyah	2
27	25020311E27	Siyasah Maliyah	2
28	20020311E28	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
29	25020311E29	Etika Profesi Hukum	2
30	25020311E30	Hukum Internasional	2
31	25020311E31	Ujian Komprehensif	2
32	25020311E32	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
33	25020311E33	Filsafat Logika	2
34	25020311E34	Hukum Perjanjian Internasional	2
35	25020311E35	Hukum Ketenagakerjaan	2

36	25020311E36	Teknik Perancangan Perundang-Undangan	2
37	25020311E37	Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan	2
38	25020311E38	Hukum Pemerintahan Daerah	2
39	25020311E39	Hukum dan Kebijakan Publik	2
40	25020311E40	Hukum Pemilu dan Partai Politik	2
41	25020311E41	Legal Opinion	2
42	25020311E42	Ilmu Politik	2
Jumlah SKS			91

E. Mata Kuliah Pilihan Program Studi* (MKPPS)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	25020312E01	Fiqh Munakahah	2
2	25020312E02	Ilmu Falak	2
3	25020312E03	Praktek Kemahiran Hukum	2
4	25020312E04	Etika Politik dalam Islam	2
5	25020312E05	Hukum Lingkungan	2
6	25020312E06	Tehnik Perancangan Kontrak	2
7	25020312E07	Hukum Adat	2
8	25020312E08	Qadlasya Siyasiyah	2
9	25020312E09	Fiqh Siyasah Kontemporer	2
10	25020312E10	Hukum Keimigrasian	2
Jumlah SKS			20
Dari 20 SKS (10 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS			

No	Status Mata kuliah	Jumlah			Keterangan
		MK	SKS	%	
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4	-
2	Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	12	26	18	-
3	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)	6	13	9	-
4	Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)	42	91	61	Termasuk 2 sks Ujian Komprehensif, 4 sks PKL, 6 sks Tugas Akhir Studi
5	Mata Kuliah Program Studi Pilihan (MKPPS)	5	10	8	Mengambil wajib 5 mata kuliah pilihan (10 sks)
Jumlah Total SKS		63	146	100	

BAGIAN I

SPEKIFIKASI

PROGRAM STUDI

1. NAMA PROGRAM STUDI

Pendirian Fakultas Syariah di Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi Islam dengan visi ulul albab (individu yang berintelektual dan saleh). Melalui proses pembelajaran di Fakultas Syariah, diharapkan para cendekiawan dan intelektual akan lahir dengan pemahaman mendalam tentang hukum dan perundang-undangan Islam, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Fakultas Syariah didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Urusan Lembaga Keagamaan Islam Nomor DJ.II/56/2005 tentang Otorisasi Pelaksanaan Program Sarjana (S-1) dan Diploma Dua (D2) di UIN Malang. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Fakultas Syariah merupakan perluasan dari Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dari Jurusan Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang, yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Lembaga Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Untuk melanjutkan pendirian Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, pada tahun 2002, Direktur Jenderal Pengembangan Lembaga Keagamaan mengeluarkan Keputusan Nomor E/10/Tahun 2002, yang menetapkan bahwa gelar bagi lulusan Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah adalah Sarjana Hukum Islam, disingkat S.HI. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor I/422/2007, Fakultas Syariah UIN Malang membuka Program Studi Hukum Bisnis Syariah (HBS). Kemudian, pada tahun 2008, dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor I/233/2008 mengenai pendirian Program Studi Perbankan Syariah D3 di Fakultas Syariah. Namun, pengelolaan Program Perbankan Syariah D3 dialihkan ke Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan Keputusan Rektor tahun 2009. Pada tahun 2015, Fakultas Syariah berhasil mendirikan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang disetujui berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 1278 Tahun 2015 tentang Otorisasi Pelaksanaan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sejalan dengan kebutuhan pengembangan keilmuan ketatanegaraan yang mengintegrasikan sains dan Islam, pada tahun 2015 Fakultas Syariah mendirikan Program Studi (PS) Hukum Tata Negara (Siyasah) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan berdirinya program studi ini, lulusan PS Hukum Tata Negara (Siyasah) berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

2. GELAR AKADEMIK YANG DIBERIKAN

Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) berhak menyandang gelar Sarjana Hukum yang disingkat S.H. Penamaan gelar ini merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, sesuai dengan pengelompokan rumpun ilmu hukum dan ketatanegaraan Islam.

3. UNIVERSITAS

Profil Universitas sebagai berikut:

Nama: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan bereputasi internasional dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, integratif, dan adaptif
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis konvergensi
3. Menyelenggarakan good university governance
4. Mengembangkan smart and green Islamic university
5. Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional

Untuk selanjutnya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim disingkat dengan UIN Malang.

4. FAKULTAS PENYELENGGARA

Profil Fakultas sebagai berikut:

Nama: Fakultas Syariah

Visi: Terwujudnya Fakultas Syariah yang Unggul dan Bereputasi Internasional dalam Mencapai Masyarakat yang Rukun, Mashlahah, dan Cerdas

Misi:

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang integratif berbasis konvergensi
2. Menghasilkan sarjana bidang syariah dan hukum yang berkarakter ulul albab
3. Meningkatkan rekognisi dan reputasi Fakultas Syariah di tingkat internasional
4. Mengembangkan Sistem Tata Kelola yang Baik Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi

5. PROGRAM STUDI

5.1. Visi Keilmuan

“Terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara yang unggul bereputasi internasional dalam mengintegrasikan Islam dan sains menuju tata kelola pemerintahan demokratis berkeadilan”.

5.2. Misi Program Studi

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Tata Negara yang profesional dan berintegritas, berorientasi pada penguasaan konsep hukum formil dan materiil berbasis integrasi sains dan Islam.
- Menyelenggarakan penelitian di bidang Hukum Tata Negara yang inovatif dan beretika untuk menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan hukum tata negara yang solutif terhadap permasalahan tata kelola pemerintahan dan sosial-kemasyarakatan.
- Menghasilkan sarjana Hukum Tata Negara yang berkarakter ulul albab dan berdaya saing internasional.

- Menjalin kemitraan dengan lembaga peradilan, lembaga legislasi, dan instansi pemerintah dalam pengembangan dan penerapan hukum tata negara, serta meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional.

5.3. Tujuan Pendidikan

Mencetak lulusan yang sukses dalam karir profesional sesuai bidang keilmuan hukum tata negara, memiliki kompetensi ketatanegaraan, serta mampu mengembangkan inovasi pendidikan dan/atau pembelajaran Hukum Tata Negara (Siyasah) secara profesional.

Mencetak lulusan yang berjiwa Pancasila dan berkarakter ulul albab berlandaskan pada kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, guna memberikan akses pendidikan hukum tata negara yang lebih luas kepada masyarakat.

Mencetak individu yang memiliki kemampuan untuk belajar melalui pendidikan lanjut serta menyediakan sarjana hukum tata negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli ketatanegaraan.

5.4. Filosofi Pendidikan

Filosofi pendidikan dalam pengembangan Hukum Tata Negara (Siyasah) senantiasa berakar pada penguatan ilmu ketatanegaraan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, di mana Hukum Tata Negara memegang peran sentral dalam menjembatani norma konstitusi, kelembagaan negara, dan nilai-nilai fiqh siyasah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan ilmu ketatanegaraan di perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan untuk menunjang akselerasi tata kelola negara yang baik sekaligus memastikan institusi tetap relevan mengikuti perkembangan teori hukum dan politik secara global.

Sebagai pusat kajian keilmuan hukum, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mengabaikan fondasi kenegaraan tersebut. Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) merupakan langkah strategis dalam upaya ini, guna melahirkan pemikiran hukum yang berbasis pada logika konstitusional dan analisis fiqh siyasah yang kuat bagi masyarakat akademik dan bangsa.

5.5. Etika Akademik

Sebagai lembaga pencetak sarjana hukum tata negara yang muslim, PS Hukum Tata Negara (Siyasah) memikul tanggung jawab moral untuk menumbuhkan budaya akademik yang berintegritas tinggi bagi seluruh lulusannya. Budaya ini berlandaskan pada nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, keterbukaan terhadap gagasan baru, objektivitas, serta semangat pengembangan diri yang dibarengi dengan sikap toleran dan nondiskriminatif. Dalam praktiknya, etika akademik ini diinternalisasikan ke dalam setiap aspek Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk pada proses perkuliahan yang mengedepankan budaya integritas, kedisiplinan waktu, serta sistem evaluasi yang transparan dan terukur.

Pada ranah penelitian dan publikasi, PS Hukum Tata Negara (Siyasah) senantiasa mengedepankan inovasi, keseriusan ilmiah, serta penghindaran terhadap konflik kepentingan guna menjaga orisinalitas karya. Tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran etika akademik beserta langkah mitigasinya adalah sebagai berikut:

Kecurangan Akademik: Segala bentuk kecurangan selama ujian akan dikenakan sanksi akademik oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilaporkan secara resmi kepada Program Studi.

Pemalsuan: Tindakan pemalsuan data atau dokumen dicegah melalui penerapan SOP ketat yang mampu mendeteksi manipulasi sejak dini.

Perjokian: Praktik perjokian dalam ujian diantisipasi melalui pengawasan ketat dan verifikasi identitas peserta sesuai prosedur operasional standar yang berlaku.

Plagiarisme: Pelanggaran integritas karya ilmiah dicegah melalui mekanisme reviu internal serta pemanfaatan perangkat lunak orisinalitas seperti Turnitin dan Grammarly yang disediakan lembaga.

Penyuapan: Segala bentuk praktik suap atau gratifikasi dicegah melalui implementasi Zona Integritas di lingkungan Fakultas Syariah UIN Malang.

Diskriminasi: Tindakan diskriminatif dan perilaku amoral lainnya diantisipasi melalui penguatan budaya adabiah serta internalisasi nilai-nilai pesantren yang menjadi fondasi karakter sivitas akademika PS Hukum Tata Negara (Siyasah).

Etika akademik di PS Hukum Tata Negara (Siyasah) diklasifikasikan ke dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Etika Komunikasi dan Integritas Ilmiah

- Integritas dan Kejujuran: Menjunjung tinggi kejujuran dalam seluruh komunikasi ilmiah, konsistensi antara pikiran dan tindakan, serta ketepatan waktu dalam memenuhi komitmen akademik.
- Objektivitas dan Keterbukaan Intelektual: Mengedepankan nalar ilmiah, bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, serta senantiasa mengikuti dinamika perkembangan hukum dan ketatanegaraan dengan semangat pembelajar sepanjang hayat.
- Ketelitian Ilmiah: Menanamkan sikap kritis, hati-hati, dan cermat dalam memvalidasi karya sendiri maupun mengevaluasi gagasan orang lain.
- Penghormatan Kekayaan Intelektual: Menghargai hak cipta, paten, dan karya orisinal orang lain dengan memberikan sitasi dan pengakuan yang semestinya.
- Amanah dan Tanggung Jawab Sosial: Melindungi kerahasiaan informasi akademik yang bersifat terbatas serta berkomitmen menggunakan kompetensi hukum tata negara untuk kemaslahatan masyarakat.
- Profesionalisme dan Kemandirian: Meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan serta menumbuhkan rasa percaya diri melalui penguasaan soft skill yang relevan.
- Keadilan dan Nondiskriminasi: Menjamin lingkungan komunikasi yang inklusif tanpa membedakan gender, ras, etnis, atau latar belakang sosial, demi terciptanya iklim akademik yang adil.

2. Etika Pelaksanaan Pembelajaran dan Interaksi Sosial

- Partisipasi Aktif dan Kolaboratif: Mendorong interaksi dua arah yang konstruktif antara dosen dan mahasiswa guna menciptakan suasana kelas yang dinamis.
- Kesantunan Berperilaku (Adabiyah): Menjaga sikap tubuh yang sopan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai norma institusi, serta menghindari aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi belajar.
- Etika Komunikasi Verbal dan Nonverbal: Menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan tidak multitafsir, baik dalam interaksi tatap muka maupun daring.

- Penghormatan dan Empati: Saling menyapa dengan santun, menghormati figur yang lebih senior, serta menggunakan panggilan atau sebutan yang layak dan memuliakan.
- Budaya Apresiasi: Terbiasa menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diterima dan berani memohon maaf secara ksatria atas kesalahan yang dilakukan.
- Pengendalian Diri: Menghindari sikap emosional, tidak menyela pembicaraan orang lain, serta menjaga etika fisik sebagai bentuk penghormatan kepada lawan bicara.
- Suasana Pembelajaran yang Humanis: Membangun atmosfer belajar yang menyenangkan melalui komunikasi yang empatik, pemberian semangat (*encourage*), serta selingan humor yang proporsional.

5.6. Akreditasi

Akreditasi merupakan instrumen penilaian standar mutu bagi lembaga pendidikan tinggi. Penerapan akreditasi ini bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam menstandarisasi dan menjamin mutu lulusan perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005, proses penentuan akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

PS Hukum Tata Negara (Siyasah), telah terakreditasi “Unggul” berdasarkan [Keputusan BAN-PT Nomor 4957/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024](#). Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang berdiri sejak tahun 2015, turut meraih predikat akreditasi Unggul dari BAN-PT sebagai bagian dari komitmen penjaminan mutu berkelanjutan.

Sejalan dengan implementasi kurikulum Outcome-Based Education (OBE), PS Hukum Tata Negara (Siyasah) terus mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) menuju standar internasional, sebagai bagian dari pentahapan pengembangan UIN Malang menuju reputasi internasional (2021–2030). Melalui pencapaian akreditasi Unggul ini, kualitas pendidikan di PS Hukum Tata Negara (Siyasah) telah diakui secara formal di tingkat nasional.

5.7. Bahasa Pengantar

PS Hukum Tata Negara (Siyasah) menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dalam kegiatan belajar mengajar kelas reguler. Sementara itu, pada kelas internasional (*International Class Program-ICP*), instruksi pembelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab, sejalan dengan karakter UIN Malang sebagai bilingual university yang mewajibkan penguasaan bahasa Arab untuk kajian sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) serta bahasa Inggris untuk kajian ilmu hukum modern dan komunikasi global.

5.8. Skema Pembelajaran

PS Hukum Tata Negara (Siyasah) berkomitmen menghadirkan pengalaman akademik transformatif guna mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teori hukum tata negara dan fiqih siyasah, tetapi juga cakap dalam implementasinya di lembaga peradilan, legislasi, maupun birokrasi pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, skema pembelajaran dirancang secara holistik untuk mengasah aspek

komunikasi, tanggung jawab sosial, kemandirian, kolaborasi tim, serta kemampuan pemecahan masalah ketatanegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Demi mencapai target capaian pembelajaran tersebut, PS Hukum Tata Negara (Siyasah) menerapkan beragam skema instruksional, meliputi pembelajaran tatap muka, *moot court* (peradilan semu), klinik konsultasi hukum, Sertifikasi *Legislative Drafting* serta model tematik di lapangan. Sistem pembelajaran jarak jauh (daring) serta model blended learning telah diintegrasikan sebagai solusi pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Selain itu, guna mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), diadopsi pendekatan pembelajaran terpadu melalui The Shared Model yang mengedepankan pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum tata negara, ilmu politik, dan syariah, baik di internal kampus maupun melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi mitra.

5.9. Persyaratan Masuk

Sistem penerimaan mahasiswa baru di UIN Malang dikelola secara terpusat oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui laman resmi <https://pmb.uin-malang.ac.id/>. Terdapat beberapa jalur seleksi yang diselenggarakan, baik di tingkat nasional maupun internal universitas:

Beasiswa Teladan: Program beasiswa dari Kementerian Agama RI bagi calon mahasiswa berprestasi istimewa, termasuk persyaratan hafalan Al-Qur'an (tahfidz) melalui skema Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB).

SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi): Jalur seleksi nasional yang menitikberatkan pada penilaian nilai rapor, portofolio, serta prestasi akademik maupun non-akademik siswa.

SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri): Pola seleksi nasional terpadu khusus perguruan tinggi keagamaan Islam berdasarkan nilai rapor dan prestasi pendukung.

UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri): Seleksi nasional masuk PTKIN melalui ujian berbasis Sistem Seleksi Elektronik (SSE).

Jalur Mandiri: Jalur seleksi yang dikelola secara otonom oleh UIN Malang berdasarkan kriteria yang ditetapkan universitas.

Sistem seleksi ini dirancang secara komprehensif guna memastikan calon mahasiswa memiliki kompetensi akademik yang unggul. Penilaian meliputi penguasaan mata pelajaran strategis seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi, Sejarah, penalaran logika, serta kemampuan bahasa (Indonesia, Arab, dan/atau Inggris), sesuai dengan standar nasional. Adapun kriteria pendaftar adalah lulusan sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK) atau sederajat pada tahun berjalan, serta lulusan dua tahun sebelumnya (gap year).

5.10. Konsep Keilmuan dan Teknologi Pendukung

Sasaran utama ilmu pengetahuan adalah pembentukan konsep, baik untuk pengembangan keilmuan murni maupun kepentingan praktis dalam penerapan nyata. Dalam disiplin Hukum Tata Negara (Siyasah), konsep keilmuan memiliki dua sifat dasar: operasional untuk kepentingan penerapan dan penyelesaian perkara, serta abstrak untuk kebutuhan penyimpulan dan generalisasi teori kenegaraan.

Sifat operasional menitikberatkan pada pengertian yang berkesesuaian dengan fakta atau situasi ketatanegaraan yang dapat diamati, seperti proses legislasi, mekanisme pemilihan umum, dan penyelenggaraan lembaga negara. Sifat abstrak digunakan untuk merumuskan keterangan ilmiah yang berlaku umum, seperti konsep kedaulatan, konsep siyasah dusturiyyah (tata negara), siyasah dauliyyah (hubungan internasional), dan siyasah maliyyah (keuangan negara) dalam perspektif fiqh siyasah.

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi katalisator utama dalam pengembangan kajian hukum tata negara. Pemanfaatan sistem informasi hukum seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi legal drafting, serta perangkat riset hukum berbasis kecerdasan buatan tidak hanya mempermudah penelusuran regulasi dan yurisprudensi, tetapi juga memperluas ruang eksplorasi dalam pengembangan teori maupun praktik ketatanegaraan mutakhir.

5.11. Masa Studi dan Cuti Akademik

Masa studi pada PS Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Malang secara reguler ditempuh dalam rentang 7 hingga maksimal 16 semester. Ketentuan ini merujuk pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 (Pasal 18 dan 23) serta Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 6058 Tahun 2025. Selain itu, PS Hukum Tata Negara (Siyasah) merancang kurikulum yang memungkinkan mahasiswa berprestasi untuk menyelesaikan beban belajar sebanyak 146 SKS (satuan kredit semester) dalam durasi 7 semester.

Penetapan SKS mengacu pada Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 17. Dalam peraturan tersebut, satu SKS dalam proses pembelajaran setara dengan durasi 170 menit per minggu per semester. Beban kerja mahasiswa PS Hukum Tata Negara (Siyasah) terbagi ke dalam kategori berikut:

Kuliah Mingguan: Terdiri atas 50 menit tatap muka di kelas, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri.

Diskusi, Tutorial, dan Seminar: Mencakup 100 menit aktivitas di kelas serta 70 menit studi mandiri per minggu.

Praktikum (Klinik Hukum, Moot Court), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, dan Magang: Berlangsung selama minimal 170 menit per minggu dalam satu semester (setara dengan minimal 20% dari total jam kumulatif).

Terkait prosedur cuti akademik, pelaksanaannya diatur dalam Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 Pasal 57. Mahasiswa berhak mengajukan cuti kuliah paling cepat pada semester 3, dengan durasi maksimal selama dua semester secara berturut-turut.

Rincian beban kerja untuk 1 SKS per semester disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Beban kerja 1 SKS setiap kegiatan pembelajaran selama satu semester

Kegiatan	Kelas/Lab	Tugas Terstruktur	Aktivitas	Praktikum/Workshop/ Seminar/PKL	Banyak Pekan	Menit	Jam
----------	-----------	-------------------	-----------	---------------------------------	--------------	-------	-----

			Mandiri				
Kuliah Mingguan	50	60	60	-	16	2720	45,3
Diskusi/Tutorial/Seminar	100	-	70	-	16	2720	45,3
PKL	-	-	-	170	16	2720	45,3

Untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan, PS Hukum Tata Negara (Siyasah) menerapkan berbagai model aktivitas pembelajaran sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Model aktivitas pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan

Capaian Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran
Pengetahuan	Perkuliahan kelas reguler
Keterampilan	Praktek Kemahiran Hukum, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Klinik Hukum, Moot Court
Kompetensi	Pembelajaran Campuran (<i>blended learning</i>), Project, Skripsi
Sikap	Praktek Kemahiran Hukum, PKL, <i>Blended learning</i> , Project, Skripsi

Model pembelajaran tersebut didefinisikan sebagai berikut:

Perkuliahan Reguler: Melibatkan sesi tatap muka bersama dosen, pemberian tugas terstruktur, serta pengembangan belajar mandiri oleh mahasiswa.

Praktikum/Klinik Hukum: Kegiatan pendampingan konsultasi hukum dan simulasi peradilan (*moot court*) yang menekankan pada observasi langsung, analisis kasus, dan penarikan kesimpulan hukum dengan bimbingan asisten/dosen.

Blended Learning: Model pembelajaran campuran yang mengintegrasikan sesi tatap muka, penugasan kelas, serta komponen praktikum atau seminar berbasis platform digital.

Praktik Kerja Lapangan (PKL): Program magang di lembaga peradilan, legislasi, atau instansi pemerintah yang relevan dengan kompetensi hukum tata negara, di bawah pengawasan dosen pembimbing dan supervisor lapangan.

Skripsi: Tugas akhir wajib yang mencakup seluruh rangkaian riset—mulai dari perencanaan hingga ujian akhir—dengan bimbingan dua orang dosen.

Keterlibatan mahasiswa dalam setiap komponen aktivitas pada setiap model pembelajaran dirinci dalam Tabel 3.

Tabel 3. Aktivitas Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran

Aktivitas Mahasiswa	Bekerja di kelas/lab	Tugas terstruktur	Aktivitas Mandiri	Praktikum/Workshop/Seminar/PKL
Kuliah kelas reguler	✓	✓	✓	
Praktek Kemahiran Hukum	✓		✓	✓
Blended learning	✓	✓	✓	✓
PKL				✓
Skripsi			✓	✓

Dalam satu semester terdapat 16 minggu efektif perkuliahan. Mahasiswa PS Hukum Tata Negara (Siyasah) diwajibkan menyelesaikan minimal 146 SKS untuk memperoleh gelar sarjana. Masa studi normal berkisar antara 8 hingga 14 semester, namun mahasiswa dengan pencapaian akademik tinggi dapat lulus dalam waktu 7 semester.

Pada tahun pertama (semester 1 dan 2), mahasiswa mengambil beban paket sebesar 20 SKS sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 39 Tahun 2005 Pasal 18. Untuk semester selanjutnya, batas maksimum SKS yang dapat diambil ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester sebelumnya, sesuai ketentuan pada Tabel 4.

Tabel 4. Beban Kerja Mahasiswa

IPK Semester Sebelumnya (skala 4)	Maksimum SKS yang Dapat Diambil
> 3.00	24
2.50 – 2.99	21
2.00 – 2.49	18
1.50 – 1.99	15
< 1.50	12

Guna memastikan kelancaran studi, setiap mahasiswa didampingi oleh seorang Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) yang berperan dalam memberikan arahan terkait perencanaan studi maupun solusi atas kendala non-akademik yang dihadapi mahasiswa.

5.12. Kekuatan/Kekhasan Program Studi

PS Hukum Tata Negara (Siyasah) memiliki keunggulan kompetitif yang membedakannya dengan program studi sejenis, yang terangkum dalam aspek-aspek berikut:

1. Keunggulan Kurikulum dan Tata Kelola Akademik

- Kurikulum Berbasis OBE dan Standar Nasional: Kurikulum didesain berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang selaras dengan KKNI Level 6, standar SN-Dikti, serta rekomendasi asosiasi profesi hukum tata negara/ketatanegaraan (APHTN-HAN).
- Siklus Evaluasi Berkelanjutan: Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders), alumni, pakar, dan pengguna lulusan melalui analisis tracer study.
- Penjaminan Mutu Modul: Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditinjau serta diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi materi dengan perkembangan hukum ketatanegaraan dan kebutuhan dunia kerja.
- Transparansi Penilaian: Implementasi standar penilaian yang objektif dan akuntabel melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD), yang memungkinkan mahasiswa mengakses hasil studi secara transparan.

2. Integrasi Keilmuan dan Karakter Ulul Albab

- Distingsi Integrasi Sains-Islam: Menanamkan karakter Ulul Albab yang mencakup kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional sebagai fondasi utama seluruh aktivitas akademik dalam kajian hukum tata negara dan fiqh siyasah.
- Program Ma'had Universitas: Mewajibkan mahasiswa tahun pertama tinggal di pesantren kampus (Ma'had) untuk penguatan karakter, bahasa Arab (PKPBA), dan bahasa Inggris (PKPBI).
- Apresiasi Tahfidz Al-Qur'an: Memberikan dukungan bagi mahasiswa penghafal Al-Qur'an melalui program beasiswa khusus dan pembinaan berkelanjutan, termasuk melalui unit Tahfidz-Turadz.

3. Pengembangan Potensi dan Fasilitas Mahasiswa

- Unit Penunjang Kompetensi: Memfasilitasi pengembangan soft skill dan kompetensi teknis mahasiswa melalui Pusat kajian hukum, unit Moot Court (peradilan semu), Law Debate Community, dan Unit Minat Bakat umum.
- Metode Pembelajaran Inovatif: Penerapan berbagai strategi pengajaran (seperti Case Method dan Project-Based Learning) yang didukung fasilitas hybrid learning dan langganan jurnal internasional.
- Layanan Informasi Terpadu: Pemanfaatan situs web program studi yang komunikatif sebagai pusat informasi panduan akademik, peraturan, dan layanan mahasiswa yang mudah diakses sejak masa orientasi (PBAK).
- Pengalaman Lapangan Terintegrasi: Program KKM dan PKL yang dirancang untuk memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum tata negara di lembaga peradilan, legislasi, dan instansi pemerintah.

6. PELUANG LULUSAN DAN PROSPEK KARIR

Hukum Tata Negara merupakan disiplin ilmu yang mempelajari struktur kelembagaan negara, mekanisme ketatanegaraan, hubungan antara negara dan warga negara, serta penyusunan produk hukum. Ilmu ini

diaplikasikan secara luas dalam pengawalan demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum publik, hingga perlindungan hak asasi manusia. Mengingat peran strategisnya dalam menjaga keutuhan konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), lulusan Program Studi Hukum Tata Negara memiliki peluang karier yang luas dan spesifik di instansi pemerintah, lembaga negara, maupun sektor publik. Berikut adalah beberapa profil utama bagi lulusan Hukum Tata Negara

- **Praktisi Hukum**

Menjadi ahli hukum/yuris yang menguasai hukum formil dan materiil tentang hukum tata negara, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum tata negara; menunjukkan sikap kepemimpinan (*leadership*), bertanggung jawab (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum tata negara; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.

- **Legal Drafter**

Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teori, praktik, maupun teknis beracara; mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah perancangan peraturan perundang-undangan; menunjukkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang konsultasi hukum tata negara dan konsultasi kebijakan yang menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, dan etika profesi.

- **Analisis Hukum**

Menjadi analis hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teori, praktik, maupun teknis beracara; memiliki pengetahuan mutakhir di bidang hukum tata negara serta menunjukkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang konsultasi hukum; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.

- **Legal Officer**

Menjadi legal officer yang menguasai teori dan prinsip hukum tata negara/siyasah serta metode penelitian; berpengetahuan luas dan responsif terhadap dinamika Hukum Tata Negara (Siyasah); mampu mengidentifikasi masalah ketatanegaraan, mendeskripsikan peraturan ketatanegaraan, menganalisis masalah tersebut dengan peraturan yang ada, dan merumuskan opini/pendapat hukum terkait ketatanegaraan yang berintegritas keilmuan; menunjukkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan hukum kelembagaan.

BAGIAN II

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

6. LANDASAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

6.1. Landasan Filosofis

Pengembangan kurikulum didasarkan pada filosofi bahwa pendidikan hukum merupakan proses berkelanjutan yang mengintegrasikan pengalaman keilmuan hukum ketatanegaraan masa lalu sebagai fondasi pembelajaran masa kini. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) memandang mahasiswa sebagai subjek didik yang memiliki keragaman bakat, minat, dan orientasi karier di bidang ketatanegaraan. Oleh karena itu, kurikulum dirancang untuk menyediakan lingkungan akademik yang kondusif agar mahasiswa dapat mengoptimalkan potensi intelektual dan profesionalnya sebagai calon ahli hukum yang menguasai hukum tata negara positif sekaligus fikih siyasah (hukum ketatanegaraan Islam) secara integratif dan universal.

6.2. Landasan Sosiologis

Kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) disusun dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan hukum ketatanegaraan, serta peran institusi dalam membentuk karakter masyarakat akademik dan calon penyelenggara negara yang berintegritas. Terdapat tiga dimensi utama dalam landasan ini:

- **Dimensi Pewarisan Budaya dan Karakter:** Mengedepankan keteladanan (*uswah*) dari dosen kepada mahasiswa dalam menanamkan etos kerja, integritas, kejujuran, dan budaya akademik yang luhur sebagaimana diteladankan dalam prinsip siyasah syar'iyah.
- **Dimensi Organisasi:** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) berperan sebagai katalisator dalam menciptakan atmosfer akademik yang mendukung profesionalisme, loyalitas, dan idealisme calon praktisi serta akademisi hukum melalui sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.
- **Dimensi Kemasyarakatan:** Kurikulum mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan adil untuk membentuk lulusan yang peka terhadap persoalan ketatanegaraan, bermoral tinggi, serta mampu berkontribusi pada penguatan demokrasi dan supremasi hukum yang beradab.

6.3. Landasan Psikologis

Menghadapi tantangan Abad ke-21, kurikulum dirancang dengan memperhatikan kesiapan mental dan kebutuhan psikologis mahasiswa untuk menguasai kompetensi global di bidang hukum dan ketatanegaraan yang mencakup tiga pilar utama:

- **Foundational Literacies:** Membangun kemampuan dasar yang kokoh pada literasi hukum dan perundang-undangan, literasi digital, literasi teknologi informasi (TIK), literasi kebijakan publik, serta pemahaman budaya dan kewarganegaraan.
- **Competencies:** Mengembangkan kemampuan kognitif dalam menghadapi masalah ketatanegaraan yang kompleks, yang meliputi berpikir kritis (*critical thinking*) dan analitis dalam penalaran hukum (*legal reasoning*), kreativitas dalam *legislative drafting*, komunikasi hukum, dan kolaborasi.
- **Character Qualities:** Membentuk kepribadian yang tangguh, memiliki inisiatif, adaptif, berjiwa kepemimpinan (*leadership*), serta memiliki empati sosial dan sensitivitas terhadap keadilan yang tinggi.

6.4. Landasan Historis

Kurikulum merespons perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dinamika politik hukum nasional, reformasi kelembagaan negara, dan kemajuan teknologi tata kelola pemerintahan yang pesat. Secara historis, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan terus bertransformasi untuk menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan yang demokratis di era digital. Hal ini diimplementasikan melalui penguatan kurikulum pada bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemilu dan Kepartaian, serta Legislative Drafting guna menghasilkan lulusan yang kompetitif dan mampu memberikan solusi hukum berbasis keadilan terhadap tantangan ketatanegaraan nasional maupun global.

6.5. Landasan Yuridis

Penyusunan Kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) merujuk pada regulasi dan standar nasional sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (sebagai rujukan historis beban SKS);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, serta Buku Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- Standar Kompetensi Lulusan Sarjana Hukum yang direkomendasikan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN);
- Standar Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM-GAMA) yang relevan dengan rumpun ilmu hukum dan syariah.

6.6. Landasan Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan kurikulum senantiasa adaptif terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang hukum dan ketatanegaraan dengan mempertimbangkan:

- **Orientasi masa depan** yang menyelaraskan keilmuan hukum tata negara dan siyasah dengan tren tata kelola pemerintahan digital (digital governance) di tingkat global, nasional, dan regional.
- **Relevansi kelembagaan** dengan melakukan pemindaian kebutuhan lembaga peradilan, legislatif, eksekutif, dan masyarakat (link and match) terhadap kualifikasi lulusan hukum tata negara.
- **Standar asosiasi dan akreditasi** untuk memenuhi ketentuan dari pemangku kepentingan seperti APHTN-HAN, BAN-PT, LAM, serta jejaring kerja sama asosiasi hukum Islam dan ketatanegaraan tingkat nasional maupun internasional.
- **Literasi digital dan inovasi hukum** dengan mengintegrasikan teknologi digital sebagai instrumen peradilan elektronik (e-court), e-government, legal drafting berbantuan teknologi, riset hukum berbasis data (legal data analytics), dan metodologi riset tugas akhir.
- **Pendekatan interdisipliner** untuk memperkuat kolaborasi keilmuan yang memadukan teori hukum tata negara positif dengan fikih siyasah serta implementasi teknologi tata kelola pemerintahan terkini.

7. LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dirancang secara strategis untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang praktisi hukum, legislasi, birokrasi pemerintahan, politik, dan akademik. Struktur kurikulum ini dibangun di atas pilar utama keilmuan yang meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Fikih Siyasah (Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, dan Siyasah Maliyah), Hukum Pemilu dan Kepartaian, serta Legislative Drafting. Penyusunan kompetensi inti dalam kurikulum ini merujuk pada standar minimal mata kuliah wajib yang ditetapkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), serta diintegrasikan dengan pemahaman konsep dasar ilmu syariah dan hukum Islam lainnya. Selain itu, kurikulum didesain secara rigid untuk memenuhi kualifikasi Sarjana Hukum pada Level 6 KKNI.

Sebagai upaya mendapatkan pengakuan kualitas di tingkat nasional maupun regional, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) telah meraih akreditasi “Unggul” dan menargetkan penguatan jejaring kerja sama internasional di bidang hukum tata negara Islam. Sejalan dengan visi tersebut, Program Studi telah mengimplementasikan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Transformasi ini membawa perubahan mendasar dibandingkan skema kurikulum sebelumnya, antara lain:

1. **Pergeseran Paradigma:** Berubah dari Content-Based Education (berorientasi materi) menjadi Outcome-Based Education (berorientasi capaian) yang mengintegrasikan aspek karakter/sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill).
2. **Restrukturisasi Kurikulum:** Melakukan penataan ulang beban SKS pada berbagai mata kuliah serta penambahan mata kuliah baru, seperti Hukum Tata Negara Darurat, Legislative Drafting, dan Hukum Pemilu, guna memastikan keselarasan dengan kebutuhan profil lulusan masa kini.

Ciri khas utama kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Malang terletak pada Paradigma Integrasi Keilmuan, yaitu perpaduan antara hukum tata negara positif (konstitusi, kelembagaan negara, dan hukum administrasi negara) dengan fikih siyasah (hukum ketatanegaraan Islam) yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, serta khazanah pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya bersumber dari metode ilmiah konvensional seperti

observasi dan kajian literatur normatif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral Pancasila serta sumber autentik ajaran Islam. Implementasi model keilmuan ini bermuara pada pembentukan karakter ulul albab, yang mencakup empat pilar utama: kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Guna mendukung visi tersebut, penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris menjadi instrumen krusial bagi sivitas akademika untuk mengkaji kitab-kitab fikih siyasah klasik sekaligus literatur hukum tata negara perbandingan (comparative constitutional law) sebagai alat komunikasi internasional.

8. PELACAKAN LULUSAN

Pemantauan lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan tracer study tahunan. Data dihimpun melalui kuesioner internal prodi serta laporan komprehensif dari unit khusus universitas, Career Development Center (CDC), yang dapat diakses melalui laman <https://cdc.uin-malang.ac.id>, dan dari Laporan Tracer Study Fakultas Syariah yang diterbitkan melalui laman <https://syariah.uin-malang.ac.id>.



Gambar 1. Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan

Berdasarkan Laporan Tracer Study Fakultas Syariah, dengan responden yang mayoritas berasal dari alumni Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), tercatat sebagian besar lulusan (sekitar 68%) sudah bekerja pada saat disurvei, sementara sisanya sedang melanjutkan studi, berwirausaha, atau belum memasuki dunia kerja. Sekitar 17% lulusan tercatat tidak langsung bekerja setelah lulus meskipun tetap memiliki kegiatan produktif, seperti melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan keahlian. Data lengkap dan termutakhir sebaiknya dirujuk langsung pada laporan tracer study terbaru yang diterbitkan oleh CDC dan Fakultas Syariah untuk keperluan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.



Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) tersebar pada berbagai profesi strategis, antara lain hakim, panitera dan jurusita pengadilan, advokat/konsultan hukum, aparatur sipil negara pada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama, penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu), staf ahli DPR/DPRD, aktivis lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta praktisi politik. Sebaran profesi ini menunjukkan relevansi kurikulum yang mengintegrasikan hukum tata negara positif dan fikih siyasah dengan kebutuhan dunia kerja di sektor hukum dan pemerintahan.

Meskipun secara umum pemangku kepentingan (stakeholders) menilai kinerja lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sudah baik, hasil tracer study mengindikasikan sejumlah aspek yang perlu terus ditingkatkan, yaitu kemampuan berbahasa asing dan keterampilan legal-tech/legislative drafting, bimbingan tes CPNS/CAKIM serta jiwa kewirausahaan hukum.

1. **Penguatan Kemampuan Bahasa Asing:** Guna mengatasi keterbatasan praktik komunikasi hukum lintas bahasa, Program Studi mendorong terciptanya ekosistem berbahasa Arab dan Inggris di lingkungan kampus, antara lain melalui kewajiban presentasi dan penulisan legal memorandum berbahasa asing pada mata kuliah tertentu, serta kerja sama pelatihan bahasa dengan Pusat Pengembangan Bahasa UIN Malang.
2. **Pengembangan Kewirausahaan dan Legal-Tech:** Untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan manajerial, kemandirian ekonomi, dan literasi teknologi hukum, Program Studi menawarkan mata kuliah Kewirausahaan dan Legal Drafting berbasis digital sebagai mata kuliah pilihan strategis. Mahasiswa juga didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kompetisi debat konstitusi, moot court, serta pelatihan legal-tech yang diselenggarakan oleh fakultas maupun universitas.
3. **Bimbingan Tes CPNS dan CAKIM:** Fakultas Syariah bekerjasama dengan Ikatan Alumni dalam bimbingan tes CPNS dan Calon Hakim (CAKIM) bertujuan membekali lulusan dengan strategi serta materi seleksi secara intensif. Kegiatan ini memanfaatkan pengalaman nyata alumni yang menjadi PNS dan Hakim, untuk mempermudah pemahaman uji kompetensi dasar maupun bidang keilmuan hukum. Diharapkan program ini dapat meningkatkan persentase kelulusan alumni di lembaga peradilan dan instansi pemerintah guna mendukung capaian akreditasi fakultas.

Hasil tracer study juga mencatat tren positif lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana ilmu hukum maupun hukum tata negara/syariah di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi lulusan telah memenuhi standar akademik untuk bersaing di level pascasarjana.

9. ANALISIS SWOT

1. *Strength* (Kekuatan)

- **Aspek Kebijakan:** Kurikulum berbasis OBE yang komprehensif dan telah terakreditasi “Unggul”, relevan dengan kebutuhan lembaga peradilan dan pemerintahan, serta didukung oleh dosen berkualifikasi hukum tata negara dan hubungan kemitraan strategis untuk program magang di lembaga peradilan, legislatif, dan pemerintahan.
- **Aspek Ekonomi:** Stabilitas jumlah mahasiswa yang menjamin keberlanjutan program, serta dukungan fasilitas ruang moot court (peradilan semu) dan pusat kajian hukum yang memadai.
- **Aspek Kepemimpinan:** Struktur organisasi yang stabil dengan kepemimpinan efektif, didukung mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, partisipatif, dan program pengembangan SDM yang terstruktur.
- **Aspek IPTEK:** Akses ke teknologi peradilan digital dan kapabilitas dosen dalam mengintegrasikan perkembangan legal-tech terbaru ke dalam pembelajaran dan riset hukum.
- **Aspek Sosial & Reputasi:** Atmosfer akademik yang solid, inklusif, dan partisipasi aktif dalam pengabdian masyarakat berbasis bantuan dan penyuluhan hukum. Memiliki reputasi kuat di bawah naungan UIN Malang dalam mencetak lulusan kompeten dengan karakter Ulul Albab, dibuktikan dengan prestasi alumni pada kompetisi debat hukum tingkat nasional.
- **Aspek Lulusan:** Alumni memiliki daya saing tinggi dengan kombinasi keilmuan hukum positif dan hukum Islam (Siyasah), kemampuan analitis, komunikasi, dan pemecahan masalah hukum ketatanegaraan yang baik sesuai kebutuhan dunia kerja.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- **Aspek Operasional:** Belum optimalnya layanan digital untuk efisiensi administrasi akademik serta ekosistem inovasi hukum yang masih memerlukan penguatan kolaborasi antara prodi dan lembaga peradilan/pemerintahan.
- **Aspek SDM Khusus:** Terbatasnya jumlah dosen dengan keahlian spesifik pada bidang hukum tata negara terapan tertentu (seperti hukum pemilu, hukum konstitusi darurat, atau legal-tech).
- **Aspek Fasilitas:** Keterbatasan anggaran untuk pembaruan sarana simulasi peradilan (moot court) dan pangkalan data hukum (legal database) secara berkala guna mengikuti kecepatan perkembangan teknologi hukum global.
- **Aspek Kemahasiswaan:** Partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan atau kegiatan sosial-politik di luar kelas masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat soft skill kepemimpinan.
- **Aspek Branding:** Visibilitas program studi di tingkat nasional/internasional masih perlu diperluas agar lebih dikenal luas oleh dunia peradilan, legislasi, dan pemerintahan, tidak hanya di lingkup regional atau keagamaan saja.
- **Aspek Karir:** Kurangnya program bimbingan karir yang spesifik mengenai diversifikasi jalur profesi hukum tata negara selain menjadi akademisi, seperti jalur legislative drafter, staf ahli, atau konsultan kebijakan publik.

3. *Opportunities* (Peluang)

- **Aspek Kebijakan & Kerjasama:** Adanya otonomi prodi dalam pengembangan mutu serta luasnya peluang kolaborasi dengan lembaga peradilan, legislatif, dan institusi luar negeri untuk integrasi riset dan modernisasi tata kelola pemerintahan.
- **Aspek Pasar Kerja:** Meningkatnya kebutuhan lembaga peradilan, legislatif, dan eksekutif terhadap lulusan yang menguasai hukum konstitusi, hukum pemilu, legislative drafting, dan tata kelola pemerintahan digital.
- **Aspek Pengembangan Pendapatan:** Potensi penyelenggaraan kursus singkat (short course), pelatihan legislative drafting berbayar, atau sertifikasi keahlian hukum tata negara bagi publik, aparatur pemerintah, dan penyelenggara pemilu.
- **Aspek Interdisipliner:** Peluang riset kolaboratif lintas disiplin di internal UIN Malang (seperti kajian Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah, atau Hukum Tata Negara dan Studi Keagamaan) yang memperkaya khazanah keilmuan.
- **Aspek Promosi:** Pemanfaatan media digital dan jejaring alumni yang berkarier di lembaga peradilan dan pemerintahan untuk memperluas jangkauan rekrutmen calon mahasiswa secara nasional.

4. Threats (Tantangan)

- **Aspek Kompetisi:** Persaingan ketat dengan program studi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara/Siyasah di perguruan tinggi negeri besar lain di Malang dan Jawa Timur yang memiliki sarana prasarana lebih mapan dan dikenal lebih awal oleh masyarakat.
- **Aspek Spesialisasi:** Munculnya program studi atau konsentrasi spesifik seperti Hukum Konstitusi, Hukum Pemilu, atau Kebijakan Publik di kampus lain yang dapat menggerus pangsa pasar lulusan hukum tata negara umum.
- **Aspek Regulasi:** Perubahan kebijakan kementerian yang dinamis (Kemendikbudristek dan Kemenag), termasuk perubahan sistem ketatanegaraan dan kepemiluan, menuntut kurikulum harus selalu adaptif dan fleksibel terhadap perubahan standar nasional.
- **Aspek Teknologi:** Akselerasi digitalisasi peradilan dan tata kelola pemerintahan yang sangat cepat menuntut investasi besar dalam pembaruan sarana pembelajaran berbasis legal-tech, sementara proses birokrasi pengadaan seringkali memerlukan waktu lama.
- **Aspek Eksternal:** Dinamika politik dan krisis global atau pergeseran budaya yang berdampak pada perubahan nilai sosial dan mentalitas calon mahasiswa, menantang prodi untuk tetap konsisten menanamkan karakter religi dan integritas hukum di tengah modernitas.



Gambar 3. Tahapan Penyusunan Kurikulum PS HTN UIN Malang

10. ANALISIS KEBUTUHAN (*MARKET SIGNAL*)

Disiplin ilmu Hukum Tata Negara memegang peranan krusial sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penguatan sistem demokrasi, penegakan konstitusi, hingga perancangan regulasi di tingkat daerah maupun nasional. Luasnya implementasi hukum publik menciptakan serapan pasar kerja yang sangat strategis dan inklusif bagi lulusan PS Hukum Tata Negara. Merujuk pada perkembangan reformasi hukum dan dinamika ketatanegaraan nasional, lulusan sarjana Hukum Tata Negara memiliki penetrasi yang signifikan di sektor lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga peradilan (seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan PTUN), lembaga pengawas independen, hingga organisasi non-pemerintah. Dinamika pasar kerja di sektor hukum publik diproyeksikan akan terus bertransformasi seiring dengan kompleksitas kebijakan publik, keharmonisan regulasi, dan pergeseran ke arah tata kelola pemerintahan berbasis digital (*e-government*), sehingga kebutuhan akan tenaga ahli dengan kemampuan analisis hukum publik, penyusunan draf perundang-undangan (*legal drafting*), dan penanganan sengketa ketatanegaraan akan tetap menjadi prioritas utama di masa depan. Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pasar dan perkembangan keilmuan mutakhir, Kurikulum PS Hukum Tata Negara UIN Malang disusun melalui tahapan sistematis guna memastikan profil lulusan yang dihasilkan adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan industri hukum serta instansi ketatanegaraan.

BAGIAN III

RUMUSAN CAPAIAN

PEMBELAJARAN

PROGRAM STUDI

11. PROSES PENETAPAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

1. Dasar Penetapan

Penetapan Profil Lulusan, Program Educational Objectives (PEO), dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) mengacu pada visi program studi, yaitu terwujudnya program studi Hukum Tata Negara yang unggul dalam mengintegrasikan hukum nasional dan hukum Islam di bidang ketatanegaraan yang berkarakter ulul albab. Penetapan ini juga berpedoman pada

Landasan Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum program studi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 untuk jenjang Sarjana, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta standar kompetensi lulusan yang direkomendasikan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

2. Proses Penetapan Capaian Pembelajaran Program Studi

Proses penetapan Profil Lulusan, PEO, dan CPL dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Kajian visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) serta hasil analisis SWOT sebagai acuan arah pengembangan kurikulum.
2. Kajian kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) melalui hasil tracer study alumni dan masukan pengguna lulusan dari lembaga peradilan, legislatif, eksekutif, dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Benchmarking dengan program studi sejenis serta rujukan standar kompetensi dari asosiasi profesi dan keilmuan, yaitu APHTN-HAN.
4. Perumusan Profil Lulusan yang mencerminkan peran dan capaian spesifik lulusan di dunia kerja.
5. Perumusan Program Educational Objectives (PEO) sebagai tujuan jangka menengah/panjang (3-5 tahun setelah lulus) yang selaras dengan profil lulusan dan visi program studi.
6. Penurunan (derivasi) PEO ke dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai SN-Dikti.
7. Pembahasan dan validasi rumusan Profil Lulusan, PEO, dan CPL melalui forum rapat program studi, workshop kurikulum, serta melibatkan dosen, tenaga ahli, alumni, dan pengguna lulusan.
8. Penetapan Profil Lulusan, PEO, dan CPL melalui keputusan rapat program studi untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam struktur mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).

3. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dirumuskan selaras dengan PEO3 (Profesionalisme Hukum) sebagai berikut:

Kode	Profil Lulusan	Deskripsi	Profesi
PL01	Praktisi Hukum	Menjadi tenaga ahli hukum yang menguasai hukum formil dan materiil di bidang hukum tata negara dan hukum Islam, berintegritas, dan menjunjung tinggi keadilan.	1. Hakim 2. Advokat 3. Panitera 4. Jaksa 5. TNI 6. Konsultan Hukum 7. Paralegal 8. Polisi

Kode	Profil Lulusan	Deskripsi	Profesi
PL02	Legal Drafter	Menjadi perancang peraturan perundang-undangan (legislative drafter) pada lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang mampu menyusun produk hukum secara sistematis, tepat asas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	1. Staff ahli perancang perundang-undangan 2. Konsultan Kebijakan Publik
PL03	Analisis Hukum	Menjadi analis kebijakan dan hukum pada lembaga pemerintahan, legislatif, maupun lembaga swadaya masyarakat yang mampu mengkaji dan memberikan rekomendasi atas persoalan hukum ketatanegaraan secara kritis dan berbasis data.	1. Analisis Hukum 2. Analisis Perkara 3. Analisis Kebijakan
PL04	Legal Officer	Menjadi tenaga hukum korporasi maupun instansi pemerintah (legal officer/staf hukum) yang menangani aspek kepatuhan hukum, tata kelola, dan penyelesaian sengketa dengan profesional dan beretika.	1. Birokrat/ Pemerintahan 2. Staf Legal Pemerintah dan Swasta

4. Program Educational Objectives (PEO)

Program Educational Objectives (PEO) merupakan capaian yang diharapkan dimiliki lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam kurun waktu 3-5 tahun setelah lulus, sebagai berikut:

Kode	Fokus	Rumusan PEO
PEO1	Karakter Integritas dan	Lulusan yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keadilan, serta kemaslahatan.
PEO2	Penguasaan Keilmuan	Menguasai secara komprehensif keilmuan Hukum Tata Negara, Siyasah, hukum Islam, hukum nasional, dan tata kelola pemerintahan.
PEO3	Profesionalisme Hukum	Unggul, kompeten, profesional, dan adaptif sebagai Praktisi Hukum, Legal Drafter, Analisis Hukum, dan Legal Officer dalam menyelesaikan persoalan hukum dan ketatanegaraan.
PEO4	Integrasi Sains dan Islam	Mampu mengintegrasikan keilmuan hukum dengan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkemaslahatan.
PEO5	Kreativitas dan Daya Saing Global	Unggul dan mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, ahli dalam memanfaatkan teknologi pada penyelesaian masalah hukum serta memiliki daya saing pada tingkat nasional dan internasional.

5. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diturunkan dari kelima PEO di atas dan dikelompokkan ke dalam empat unsur sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

5.1. Unsur Sikap (S)

Kode	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Keterkaitan PEO
S1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius, humanis dan inklusif	PEO1
S2	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, empati, semangat kemandirian	PEO1
S3	Menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik dengan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya.	PEO1, PEO3

5.2. Unsur Pengetahuan (P)

Kode	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Keterkaitan PEO
P1	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum yang berlaku di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (<i>curiosity</i>) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara	PEO2
P2	Menguasai dan memahami metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara	PEO2, PEO4
P3	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi	PEO4

5.3. Unsur Keterampilan Umum (KU)

Kode	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Keterkaitan PEO
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu, terukur dan akuntabel	PEO5

Kode	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Keterkaitan PEO
KU2	Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk laporan tugas akhir, yang sah, bebas plagiasi dan terpublikasi nasional/ internasional	PEO5
KU3	Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, melakukan evaluasi,serta memiliki kemampuan Bahasa Internasional	PEO5

5.4. Unsur Keterampilan Khusus (KK)

Kode	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Keterkaitan PEO
KK1	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah Hukum Tata Negara secara litigasi dan non litigasi	PEO3
KK2	Mampu menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian Hukum Tata negara di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan	PEO3
KK3	Mampu Menyusun dan merumuskan dokumen hukum, peraturan perundang- undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	PEO3

6. Matriks Keterkaitan PEO dan CPL

Matriks berikut menunjukkan keterkaitan antara Program Educational Objectives (PEO) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah dirumuskan, guna memastikan bahwa setiap PEO terpetakan secara utuh ke dalam CPL program studi.

CPL	PEO1	PEO2	PEO3	PEO4	PEO5
S1	✓				
S2	✓				
S3	✓		✓		
P1		✓			
P2		✓		✓	
P3				✓	

CPL	PEO1	PEO2	PEO3	PEO4	PEO5
KU1					✓
KU2					✓
KU3					✓
KK1			✓		
KK2			✓		
KK3			✓		

7. Kelompok Mata Kuliah Pendukung PEO

Guna mewujudkan pencapaian setiap PEO, struktur kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dikelompokkan ke dalam rumpun mata kuliah sebagai berikut. Rumpun ini menjadi acuan awal dalam penyusunan struktur mata kuliah dan sebaran semester pada dokumen kurikulum lebih lanjut.

PEO	Kelompok Mata Kuliah	Contoh Mata Kuliah Pendukung
PEO1	Pendidikan Karakter & Ulul Albab	Studi Al-Qur'an dan Hadis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Etika Profesi Hukum.
PEO2	Keilmuan Inti HTN & Siyasah	Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Siyasah Maliyah, Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan, Hukum Konstitusi, Hukum Kepartaian dan Pemilu.
PEO3	Keterampilan Profesi Hukum	Legislative Drafting, Praktik Kemahiran Hukum, Hukum Acara, Legal Opinion & Contract Drafting, PKL.
PEO4	Integrasi Sains dan Islam	Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, Filsafat Hukum Islam, Studi Integrasi Hukum Nasional dan Syariah.
PEO5	Inovasi, Teknologi & Daya Saing Global	Hukum Internasional, Siyasah Dauliyah, Perbandingan Hukum Tata Negara, Sejarah Peradaban Islam, Pemikiran Politik Kontemporer, Metodologi Penelitian Hukum, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Hukum, Etika Profesi Hukum.

Dokumen Profil Lulusan, PEO, dan CPL ini menjadi dasar bagi penyusunan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), struktur kurikulum, sebaran mata kuliah per semester, serta strategi dan asesmen pembelajaran pada tahap penyusunan kurikulum berikutnya, dan akan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme tracer study dan umpan balik pemangku kepentingan.

1. MATRIKS KETERKAITAN PROFIL LULUSAN (PL) DENGAN CPL

Kategori CPL	Kode CPL	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	PL 01	PL 02	PL 03	PL 04
Sikap	S1-CPL 01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius, humanis dan inklusif	v	v		
	S2-CPL 02	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, empati, semangat kemandirian	v	v	v	v
	S3-CPL 03	Menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik dengan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya	v	v	v	v
Keterampilan Umum	KU 01-CPL 04	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu, terukur dan akuntabel	v	v	v	
	KU 02-CPL 05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk laporan tugas akhir, yang sahih, bebas plagiasi dan terpublikasi nasional/internasional	v		v	
	KU 03-CPL 06	Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, melakukan evaluasi, serta memiliki kemampuan Bahasa Internasional	v		v	v
Keterampilan Khusus	KK 01-CPL 07	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah Hukum Tata Negara secara litigasi dan non litigasi	v	v	v	v
	KK 02-CPL 08	Mampu menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian Hukum Tata Negara di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan	v	v	v	v
	KK 03-CPL 09	Mampu menyusun dan merumuskan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia		v	v	

	KK04-CPL 10	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan hukum secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dalam mewujudkan profesionalisme di bidang Tata Kelola Pemerintahan	v			
Pengetahuan	P01-CPL 11	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum yang berlaku di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (curiosity) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara	v	v	v	v
	P02-CPL 12	Menguasai dan memahami metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara	v	v	v	
	P03-CPL 13	Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi	v		v	

Berdasarkan Profil Lulusan dan *Program Educational Objectives* (PEO) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), disusun Capaian Pembelajaran Lulusan (*Program Learning Outcomes*/PLO) sebagai acuan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, bekerja sama, dan berinteraksi mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan program studi Hukum Tata Negara. Secara umum, PS Hukum Tata Negara menyusun PLO menjadi empat orientasi pencapaian, yakni:

- **Orientasi pada Perilaku (*Attitude & Professional Ethics*):** Meliputi kematangan profesional, keagungan akhlak, kedalaman spiritual berbasis nilai Fiqh Siyasah, keluasan ilmu hukum, penuh tanggung jawab terhadap profesi hukum, berintegritas, beretika keprofesian (*legal ethics*), berwawasan kebangsaan, serta komitmen pada penegakan hukum yang adil dan pembelajaran sepanjang hayat.
- **Orientasi pada Pengetahuan (*Knowledge & Legal Theory*):** Meliputi penguasaan teori hukum publik, asas-asas Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, mekanisme peradilan konstitusi dan TUN, teori tata kelola pemerintahan (*good governance*), regulasi perundang-undangan, serta konsep dan kaidah Fiqh Siyasah/Hukum Islam.
- **Orientasi pada Pemecahan Masalah (*Problem Solving & Legal Analysis*):** Meliputi penemuan hukum (*rechtvinding*), penalaran hukum (*legal reasoning*), pemecahan sengketa ketatanegaraan/pilkada, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, analisis kebijakan publik, serta pemberian pertimbangan hukum (*legal opinion*) untuk isu-isu ketatanegaraan dan tata kelola instansi.
- **Orientasi pada Keterampilan (*Skills & Practical Expertise*):** Meliputi keterampilan merancang naskah akademik dan draf perundang-undangan (*legal drafting*), ketrampilan litigasi dan non-

litigasi di peradilan (*moot court*), audit kepatuhan hukum (*legal officer compliance*), penyusunan dokumen hukum formal, kerja tim multidisiplin, komunikasi hukum, pemanfaatan teknologi hukum (*legal tech/e-government*), serta berpikir kritis, analitis, dan inovatif dalam merespons dinamika hukum publik.

- **CPL 01** : Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius, humanis dan inklusif (*Attitude*)
- **CPL 02** : Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, empati, semangat kemandirian (*Attitude*)
- **CPL 03**: Menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik dengan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya (*Attitude, Apply*)
- **CPL 04** : Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu, terukur dan akuntabel (*Analyze, Evaluate, Create*)
- **CPL 05**: Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk laporan tugas akhir, yang sahih, bebas plagiasi dan terpublikasi nasional/internasional (*Evaluate, Create*)
- **CPL 06**: Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, melakukan evaluasi, serta memiliki kemampuan Bahasa Internasional (*Apply, Evaluate, Attitude*)
- **CPL 07**: Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah Hukum secara umum dan Hukum Tata Negara pada khususnya secara litigasi dan non litigasi (*Apply, Analyze*)
- **CPL 08**: Mampu menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian Hukum Tata Negara di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan (*Apply*)
- **CPL 09**: Mampu menyusun dan merumuskan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (*Create, Analyze*)
- **CPL 10**: Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan hukum secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dalam mewujudkan profesionalisme di bidang Tata Kelola Pemerintahan (*Apply, Attitude*)
- **CPL 11**: Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum yang berlaku di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (*curiosity*) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara (*Remembering, Comprehend, Analyze*)
- **CPL 12**: Menguasai dan memahami metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara (*Comprehend, Analyze, Evaluate*)
- **CPL 13**: Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi (*Remembering, Comprehend*)

Selanjutnya, berdasarkan kurikulum berbasis KKNI Level 6, capaian pembelajaran lulusan sarjana dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu: Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Umum dan Ketrampilan Khusus. Ketiga kategori ini disesuaikan dengan indikator kompetensi KKNI Level 6 dan indikator kompetensi keprodian ditambahkan dengan penciri khusus kekhasan universitas (Integrasi keilmuan dengan nilai-nilai

keislaman). CPL tersebut mendasari tersusunnya PLO dalam kurikulum OBE Program Studi HTN. Oleh karena itu, konversi CPL SN-Dikti ke PLO OBE terwakili dengan operasionalisasi Sikap, Keterampilan Umum, Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan

Matriks Pemetaan (Konversi) CPL (KKNI/SN-Dikti) dengan PLO (OBE)

Aspek Sikap

KODE	KODE CPL SANDAR NASIONAL PPENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020	KOD E	KODE CPL PRODI Hukum Tata Negara (Siyasah)
S01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	S01- CPL 01	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius, humanis dan inklusif (S01, S02, S05)
S02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		
S03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
S04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	S02- CPL 02	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, empati, semangat kemandirian (S03, S004, S06, S07, S10)
S05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		
S06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
S07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	S03- CPL 03	Menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik dengan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya (S08, S09)
S08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;		
S09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan		
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.		

Aspek Keterampilan Umum

KOD E	CPL SANDAR NASIONAL PPENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020	KOD E	KODE CPL PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
----------	---	----------	--

KU01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	KU01- CPL 04	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu, terukur dan akuntabel (KU01, KU02, KU07)
KU02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;		
KU03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;		
KU04	menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	KU02- CPL 05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk laporan tugas akhir, yang sah, bebas plagiasi dan terpublikasi nasional/ internasional (KU03, KU04, KU09)
KU05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;		
KU06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;		
KU07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;		Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, melakukan

KU08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	KU03-CPL 06	evaluasi,serta memiliki kemampuan Bahasa Internasional. (KU05, KU06, KU08)
KU09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		

Aspek Keterampilan Khusus

Kompetensi	Kode	Deskripsi
KETERAMPILAN KHUSUS	KK-1 CPL 07	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah Hukum secara umum dan Hukum Tata Negara pada khususnya secara litigasi dan non litigasi
	KK-2 CPL 08	Mampu menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian Hukum Tata negara di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan
	KK-3 CPL 09	Mampu Menyusun dan merumuskan dokumen hukum, peraturan perundang- undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
	KK-4 CPL 10	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan hukum secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dalam mewujudkan profesionalisme di bidang Tata Kelola Pemerintahan

Aspek Pengetahuan

Kompetensi	Kode	Deskripsi
Pengetahuan	P-1 CPL 11	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum yang berlaku di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (<i>curiosity</i>) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara
	P-2 CPL 12	Menguasai dan memahami metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara

	P-3 CPL 13	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi
--	------------------	--

2. ANALISIS SMART CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI

Analisis SMART merupakan metode yang digunakan dalam mengukur ketercapaian dari sebuah tujuan yang ingin dicapai, dengan mendasarkan pada indikator-indikator: *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant*, dan *Timely Bound*.

a. Aspek Spesifik (Specific)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) disusun mengacu pada Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (serta kerangka SN-Dikti dan KKNI Level 6). Setiap CPL mencakup aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus yang dirumuskan secara eksplisit menggunakan Kata Kerja Operasional (KKO) Taksonomi Bloom (seperti *menganalisis*, *merumuskan*, *menyusun*, *mengevaluasi*, dan *menginterpretasikan*).

Seluruh spesifikasi CPL mencerminkan integrasi ilmu keislaman (Fiqh Siyasah) dan sains/hukum positif modern untuk mewujudkan *tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan* berstandarisasi internasional. CPL diturunkan secara spesifik ke dalam empat profil lulusan utama:

- Praktisi Hukum: Mampu mempraktikkan hukum litigasi dan non-litigasi ketatanegaraan (MK, PTUN, Pengadilan Agama) berbasis keadilan dan integritas Islam.
- Legal Drafter: Mampu merancang naskah akademik serta draf peraturan perundang-undangan (UU/Perda) dan regulasi daerah yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Analis Hukum: Mampu menelaah, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kebijakan publik serta sengketa konstitusi secara ilmiah, kritis, dan bereputasi global.
- Legal Officer: Mampu mengelola kepatuhan hukum (*legal compliance*), riset dokumen, serta penanganan konflik regulasi internal instansi pemerintah maupun entitas publik/swasta.

b. Aspek Keterukuran (Measurable)

Aspek keterukuran CPL PS Hukum Tata Negara (Siyasah) dipastikan terukur mulai dari proses pembentukan, perumusan, hingga penerapannya pada setiap mata kuliah melalui indikator berikut:

- Kesesuaian CPMK/CO: Setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (*Course Outcome*) yang diturunkan langsung dari CPL yang dibebankan dan dituangkan dalam Modul Handbook serta RPS (seperti MK *Perancangan Perundang-Undangan*, *Hukum Acara MK*, *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, dan *Legal Compliance*).
- Penilaian Otentik Berbasis Produk & Praktikum: Muatan kurikulum diukur melalui bentuk penilaian berbasis kinerja (*performance-based assessment*), seperti simulasi peradilan semu

(*moot court*), lokakarya perancangan undang-undang (*drafting workshop*), penyusunan *legal opinion* (LO), dan analisis audit hukum.

- Evaluasi Periodik & Mutu Internasional: Evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM) dilakukan secara berkala di akhir semester mencakup analisis kuantitatif (capaian IPK, ketercapaian CPMK) dan kualitatif (portofolio analisis hukum dan ketercapaian standar akreditasi internasional).

c. Aspek Ketercapaian (Achievable)

Aspek ketercapaian CPL ditentukan oleh indikator kinerja akademik mahasiswa dan ketercapaian CPMK mata kuliah. Mahasiswa dapat menyelesaikan beban studi minimal 146 SKS (maksimal 14 semester) untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ketercapaian SKS dirancang bertahap agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi integratif antara keislaman, sains hukum, dan demokratisasi tata kelola pemerintahan, yang dibuktikan melalui:

- Penyusunan naskah draf hukum dan regulasi publik (*Legal Drafter*).
- Keterampilan litigasi dan advokasi hukum publik (*Praktisi Hukum*).
- Formulasi dokumen analisis hukum, kebijakan publik, dan *legal opinion* (*Analisis Hukum & Legal Officer*).

d. Aspek Relevansi (Relevant)

Perumusan CPL PS Hukum Tata Negara (Siyasah) memiliki relevansi tinggi dengan dinamika hukum ketatanegaraan, kebutuhan pasar kerja global, serta perkembangan IPTEKS. CPL dirumuskan melalui analisis SWOT mendalam dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna (*stakeholders* seperti Mahkamah Konstitusi, PTUN, KPU, Bawaslu, Kemenkumham, serta lembaga hukum internasional), dan asosiasi profesi (seperti APHUTARI, APHTN-HAN).

Relevansi ditunjukkan lewat pemutakhiran bahan kajian yang mengintegrasikan Islam dan sains, seperti pembentukan mata kuliah *Hukum Tata Negara Digital (e-Government)*, *Hukum Pemilu & Demokrasi*, *Siyasah Kharijiyah & Hukum Internasional*, serta *Audit Hukum dan Kepatuhan*.

e. Aspek Timely Bound

CPL PS Hukum Tata Negara (Siyasah) dirumuskan agar dapat dicapai secara optimal dalam rentang waktu rata-rata 3,5 hingga 4 tahun (7–8 semester) melalui pentahapan struktur kurikulum:

- Tahap Dasar (Semester 1–2): Penguatan landasan nilai Keislaman, MKU, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, dan Dasar-Dasar Fiqh Siyasah.
- Tahap Keahlian Inti & Integrasi (Semester 3–5): Pembentukan kompetensi inti HTN dan Siyasah (Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Acara MK/PTUN, Hukum Pemilu).

- Tahap Penerapan & Praktik Profesi (Semester 6–7): Pelaksanaan keahlian praktis terapan (*Legal Drafting*, Praktek Kemahiran Hukum, *Moot Court*, Magang/Praktik Kerja Lapangan di lembaga Peradilan/kantor hukum/KPU/Bawaslu), Skripsi/Tugas Akhir, dan Uji Kompetensi Sertifikasi Hukum.

Pentahapan waktu ini dievaluasi secara berkala di setiap akhir fase untuk memastikan indeks prestasi akumulatif (IPK) dan ketuntasan mata kuliah prasyarat terpenuhi tepat waktu.

BAGIAN IV

PENETAPAN BAHAN KAJIAN

10. PENETAPAN BAHAN KAJIAN DAN MATRIKS HUBUNGAN BAHAN KAJIAN DENGAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

A. Dasar dan Proses Penetapan Bahan Kajian

Penetapan Bahan Kajian (BK) pada Kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dilakukan melalui pendekatan Outcome Based Education (OBE), yaitu proses penurunan (deriving) capaian pembelajaran lulusan (CPL) ke dalam kelompok-kelompok materi keilmuan yang relevan.

Penetapan ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui serangkaian kajian akademik yang melibatkan tim pengembang kurikulum, dosen rumpun keilmuan, pakar Hukum Tata Negara/Siyasah, asosiasi program studi (APHTN-HAN dan Asosiasi Prodi Siyasah), pengguna lulusan (stakeholder), serta alumni, sehingga Bahan Kajian yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan keilmuan, kebutuhan dunia kerja, dan nilai keislaman yang menjadi ciri khas program studi.

Secara metodologis, penetapan Bahan Kajian ditempuh melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan identifikasi Profil Lulusan dan rumusan CPL yang mengacu pada level 6 KKNI/deskriptor Sarjana serta capaian pembelajaran menurut SN-Dikti, yang mencakup aspek sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill), baik umum maupun khusus. Kedua, dilakukan analisis body of knowledge keilmuan Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah, mencakup teori kenegaraan, konstitusi, fiqh siyasah dusturiyah/maliyah/dauliyah, hukum administrasi negara, hukum acara, legal drafting, hingga kebijakan publik dan hukum internasional. Ketiga, dilakukan pemetaan (mapping) antara substansi keilmuan tersebut dengan rumusan CPL untuk memastikan setiap CPL memiliki materi pendukung yang memadai, dan sebaliknya setiap Bahan Kajian memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian CPL. Hasil pemetaan inilah yang kemudian dikristalisasi menjadi delapan kelompok Bahan Kajian (BM 01–BM 08). Kedelapan Bahan Kajian tersebut disusun secara berjenjang dan saling melengkapi, mulai dari penguatan landasan sikap dan kepribadian (BM 01), kemampuan bahasa dan nalar hukum (BM 02), penguasaan disiplin inti Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah (BM 03 dan BM 05), kemampuan tata kelola pemerintahan (BM 04), keterampilan teknis perancangan hukum (BM 06), praktik beracara dan peradilan (BM 07), hingga wawasan kebijakan publik dan hukum internasional (BM 08). Struktur ini memastikan bahwa lulusan tidak hanya menguasai aspek keilmuan (hard skill) berupa teori dan konsep hukum ketatanegaraan, tetapi juga memiliki sikap, etika, dan keterampilan praktis (soft skill) yang dibutuhkan dalam dunia kerja maupun pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Deskripsi Bahan Kajian dan Kontribusinya terhadap CPL

- **BK 01 : Agama, Filsafat & Kewarganegaraan**

Landasan moral Islam, etika, filsafat hukum, dan nilai kebangsaan/Pancasila. Bahan kajian ini terutama mendukung pencapaian CPL01, CPL02, CPL03, CPL12, CPL13.

- **BK 02 : Bahasa & Argumentasi Hukum**

Kemampuan bahasa (Arab, Inggris, Indonesia) untuk logika hukum, analisis naskah, dan penyusunan karya ilmiah. Bahan kajian ini terutama mendukung pencapaian CPL03, CPL04, CPL05, CPL06, CPL11.

- **BK 03 : Hukum Tata Negara & Konstitusi**

Konsep negara, lembaga negara, sistem pemerintahan, dan hukum konstitusi. Bahan kajian ini terutama mendukung pencapaian CPL04, CPL08, CPL09, CPL11, CPL13.

- **BK 04 : Hukum Administrasi & Tata Kelola Pemerintahan**

Aturan tata kelola pemerintahan (good governance), hukum publik/privat pendukung, dan sengketa TUN. Bahan kajian ini terutama mendukung pencapaian CPL08, CPL09, CPL10.

- **BK 05 : Fiqh Siyasah (HTN Islam)**

Hukum tata negara Islam yang mencakup politik, keuangan negara, birokrasi, dan hubungan internasional Islam. Bahan kajian ini terutama mendukung pencapaian CPL01, CPL08, CPL11, CPL12.

- **BK 06 : Perancangan Hukum (Legal Drafting)**

Teknik menyusun undang-undang, perda, kontrak, dan dokumen hukum resmi. Bahan kajian ini terutama mendukung pencapaian CPL04, CPL05, CPL09.

- **BK 07 : Hukum Acara & Praktik Peradilan**

Tata cara persidangan (MK, PTUN, Agama, Perdata/Pidana) dan praktik advokasi/magang.
Bahan kajian ini terutama mendukung pencapaian CPL03, CPL07, CPL10.

- **BK 08 : Kebijakan Publik & Hukum Internasional**

Hukum pemilu, politik hukum, analisis kebijakan publik, serta hubungan dan perjanjian internasional. Bahan kajian ini terutama mendukung pencapaian CPL02, CPL06, CPL08, CPL09.

C. Matriks Hubungan Bahan Kajian dengan CPL

Keterkaitan antara Bahan Kajian dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) selanjutnya dituangkan dalam bentuk matriks hubungan sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tanda checklist (✓) pada perpotongan baris Bahan Kajian dan kolom CPL menunjukkan bahwa Bahan Kajian yang bersangkutan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian CPL tersebut. Matriks ini menjadi dasar bagi penyusunan mata kuliah, penetapan bobot sks, serta penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada tahap selanjutnya, sehingga terjamin adanya benang merah (constructive alignment) antara CPL, Bahan Kajian, mata kuliah, dan proses pembelajaran di kelas.

Tabel Matriks Hubungan Bahan Kajian (BM) dengan CPL

[illegible]

Bahan Kajian	CP L 01	CP L 02	CP L 03	CP L 04	CP L 05	CP L 06	CP L 07	CP L 08	CP L 09	CP L 10	CP L 11	CP L 12	CP L 13
BK 02 – Bahasa & Argumentasi Hukum			√	√	√	√					√		
BK 03 – Hukum Tata Negara & Konstitusi				√				√	√		√		√
BK 04 – Hukum Administrasi & Tata Kelola								√	√	√			
BK 05 – Fiqh Siyasah (HTN Islam)	√							√			√	√	
BK 06 – Perancangan Hukum (Legal Drafting)				√	√				√				
BK 07 – Hukum Acara & Praktik Peradilan			√				√			√			
BK 08 – Kebijakan Publik & Hukum Internasional		√				√		√	√				

Matriks Hubungan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah PS HTN (Siyasah)

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks	BM 01 Agama, Filsafat & KWN	BM 02 Bahasa & Argumentasi Hukum	BM 03 HTN & Konstitusi	BM 04 Hukum Administrasi & Tata Kelola Pemerintahan	BM 05 Fiqh Siyasah (HTN Islam)	BM 06 Perancangan Hukum (Legal Drafting)	BM 07 Hukum Acara & Praktik Peradilan	BM 08 Kebijakan Publik & Hukum Internasional
1	24000011A01	Pancasila	2	✓							
2	25020311C05	Pengantar Hukum Indonesia	2			✓					
3	25000011B01	Bahasa Arab Dasar	2		✓						
4	25000011B02	Struktur dan Kosakata Bahasa Arab	2		✓						
5	25000011B07	Filsafat Ilmu	2	✓							
6	25000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2	✓							
7	25000011B10	Studi Al'Quran dan Al' Hadist	2	✓							
8	25000011B11	Studi Fiqh	2					✓			
9	25020311C04	Pengantar Ilmu Hukum	2			✓					
10	25020311E19	Ilmu Negara	2			✓					
11	24000011A02	Kewarganegaraan	2	✓							
12	25000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2		✓						
13	25000011B04	Bahasa Arab Praktis	2		✓						
14	25020311C01	Ulumul Qur'an dan Tafsir Ahkam	2	✓							
15	25020311E01	Ulumul Hadist	2	✓							
16	25020311C02	Ushul Fiqh	3					✓			
17	24000011A03	Bahasa Indonesia	2		✓						

18	25020311E25	Siyasah Dusturiyah	2					✓			
19	25020311E33	Filsafat Logika	2		✓						
20	25020311C03	Fiqh Ibadah	2					✓			
21	25000011B05	Bahasa Inggris Umum	3		✓						
22	25020311E30	Hukum Internasional	2								✓
23	25000011B09	Teosofi	2	✓							
24	25020311E06	Qawaid Fiqh Siyasah	2					✓			
25	25020311E37	Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan	2		✓			✓			
26	25020311E11	Hukum Agraria	2				✓				
27	25020311E27	Siyasah Maliyah	2					✓			
28	25020311C06	Hukum Tata Negara	2			✓					
29	25020311E24	Hukum Administrasi Negara	2				✓				
30	25020311E10	Peradilan Agama Di Indonesia	2							✓	
31	25020311E03	Fiqh Mawaris	2					✓			
32	25000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3		✓						
33	25020311E34	Hukum Perjanjian Internasional	2								✓
34		Hukum Keuangan Negara	2				✓	✓			
35	25020311E07	Hadist Ahkam Siyasah	2					✓			
36	25020311E13	Hukum Acara PTUN	2							✓	
37	25020311E18	Hukum Lembaga Negara	2			✓					
38	250203110E1 2	Metodologi Penelitian hukum	3		✓						

39	25020311E05	Hukum Pidana	2				✓				
40	25020311E06	Hukum Perdata	2				✓				
41	25020311E21	Hukum Konstitusi	2			✓					
42	25020311E23	Ilmu Perundang-Undangan	2						✓		
43	25020311E35	Hukum Ketenagakerjaan	2				✓				
44	25020311E17	Pemikiran Politik islam Kontemporer	2					✓			
45	25020311E36	Teknik Perancangan Perundang-undangan	2						✓		
46	25020311E14	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2							✓	
47	25020311E26	Siyasah Dauliyah	2					✓			✓
48	25020311E15	Sosiologi Hukum	2				✓				
49	25020311E22	Politik Hukum	2								✓
50	25020311E09	Hukum Acara Perdata	2							✓	
51	25020311E08	Hukum Acara Pidana	2							✓	
52	25020311E38	Hukum Pemerintahan Daerah	2				✓				
53	25020311E16	Syariah dan HAM	2	✓				✓			
54	25020311E40	Hukum Pemilu dan Parpol	2								✓
55	25020311E39	Hukum Kebijakan Publik	2								✓
56	25020311E20	Perbandingan Hukum Tata Negara	2			✓					
57	25020311E29	Etika Profesi Hukum	2	✓							
58	25020311E41	Legal Opinion	2						✓		
59	25020311B12	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2							✓	

60	25020311E42	Ilmu Politik	2								✓
61	25020312E03	Praktek Kemahiran Hukum	-							✓	
62	25020312E04	Etika Politik Dalam Islam	-	✓				✓			
63	25020312E05	Hukum Lingkungan	-				✓				
64	25020312E06	Tehnik Perancangan Kontrak	-						✓		
65	25020312E07	Hukum Adat	-				✓				
66	25020312E01	Fiqh Munakahah	-					✓			
67	25020311E02	Fiqh Muamalah	-					✓			
68	25020312E02	Ilmu Falak	-	✓							
69	25020312E10	Hukum Keimigrasian	-				✓				✓
70	20020311E28	PKL	4							✓	
71		sempro	-							✓	
72	25020311E31	kompre	2							✓	
73	25020311E32	TAS	6							✓	
			146	12	10	7	11	16	4	11	8

Matriks Hubungan Sebaran Mata Kuliah PS HTN dengan CPL

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks	CPL 01	CPL 02	CPL 03	CPL 04	CPL 05	CPL 06	CPL 07	CPL 08	CPL 09	CPL 10	CPL 11	CPL 12	CPL 13
1	24000011A01	Pancasila	2	✓	✓											✓
2	25020311C05	Pengantar Hukum Indonesia	2			✓	✓			✓				✓		
3	25000011B01	Bahasa Arab Dasar	2	✓					✓							✓
4	25000011B02	Struktur dan Kosakata Bahasa Arab	2	✓					✓							✓
5	25000011B07	Filsafat Ilmu	2	✓		✓	✓								✓	
6	25000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2	✓		✓									✓	✓
7	25000011B10	Studi Al'Quran dan Al' Hadist	2	✓		✓									✓	
8	25000011B11	Studi Fiqh	2	✓		✓									✓	
9	25020311C04	Pengantar Ilmu Hukum	2				✓				✓			✓		✓
10	25020311E19	Ilmu Negara	2				✓				✓			✓		✓
11	24000011A02	Kewarganegaraan	2	✓	✓											✓
12	25000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2	✓					✓							✓
13	25000011B04	Bahasa Arab Praktis	2	✓					✓							✓
14	25020311C01	Ulumul Qur'an dan Tafsir Ahkam	2	✓		✓									✓	
15	25020311E01	Ulumul Hadist	2	✓		✓									✓	
16	25020311C02	Ushul Fiqh	3	✓		✓									✓	
17	24000011A03	Bahasa Indonesia	2				✓	✓						✓		

18	25020311E25	Siyasah Dusturiyah	2							✓	✓		✓	✓	
19	25020311E33	Filsafat Logika	2	✓			✓	✓					✓		
20	25020311C03	Fiqh Ibadah	2	✓		✓								✓	
21	25000011B05	Bahasa Inggris Umum	3				✓	✓	✓						✓
22	25020311E30	Hukum Internasional	2						✓	✓			✓		✓
23	25000011B09	Teosofi	2	✓		✓								✓	
24	25020311E06	Qawaid Fiqh Siyasah	2							✓	✓		✓	✓	
25	25020311E37	Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan	2			✓	✓	✓						✓	
26	25020311E11	Hukum Agraria	2						✓	✓		✓	✓		
27	25020311E27	Siyasah Maliyah	2							✓	✓		✓	✓	
28	25020311C06	Hukum Tata Negara	2							✓	✓		✓		✓
29	25020311E24	Hukum Administrasi Negara	2							✓	✓	✓			
30	25020311E10	Peradilan Agama Di Indonesia	2			✓			✓	✓		✓			
31	25020311E03	Fiqh Mawaris	2						✓	✓			✓	✓	
32	25000011B06	Bahasa inggris Akademik	3				✓	✓	✓						✓
33	25020311E34	Hukum Perjanjian Internasional	2						✓	✓			✓		✓
34		Hukum Keuangan Negara	2							✓	✓	✓	✓		
35	25020311E07	Hadist Ahkam Siyasah	2							✓	✓		✓	✓	

36	25020311E13	Hukum Acara PTUN	2			✓				✓		✓	✓	✓		
37	25020311E18	Hukum Lembaga Negara	2								✓		✓	✓		✓
38	250203110E12	Metodologi Penelitian hukum	3			✓	✓	✓	✓							
39	25020311E05	Hukum Pidana	2			✓	✓					✓	✓			
40	25020311E06	Hukum Perdata	2			✓	✓					✓	✓			
41	25020311E21	Hukum Konstitusi	2								✓	✓		✓		✓
42	25020311E23	Ilmu Perundang-Undangan	2								✓	✓		✓	✓	
43	25020311E35	Hukum Ketenagakerjaan	2			✓	✓					✓	✓			
44	25020311E17	Pemikiran Politik islam Kontemporer	2	✓		✓					✓				✓	
45	25020311E36	Teknik Perancangan Perundang-undangan	2								✓	✓		✓	✓	
46	25020311E14	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2			✓				✓		✓	✓		✓	
47	25020311E26	Siyasah Dauliyah	2								✓			✓	✓	✓
48	25020311E15	Sosiologi Hukum	2								✓	✓	✓			
49	25020311E22	Politik Hukum	2								✓	✓		✓	✓	
50	25020311E09	Hukum Acara Perdata	2			✓				✓			✓			
51	25020311E08	Hukum Acara Pidana	2			✓				✓			✓			

69	25020312E10	Hukum Keimigrasian	-								✓	✓		✓	✓	
70	20020311E28	PKL	4		✓	✓				✓			✓			
71		sempro	-			✓		✓	✓	✓			✓			
72	25020311E31	kompre	2			✓				✓			✓	✓		
73	25020311E32	TAS	6			✓		✓	✓	✓			✓			

Total Jumlah SKS Yang harus ditempuh dalam PS HTN (Siyasah) sebanyak 146 sks.

Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester PS HTN (Siyasah)

Semester 1

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	24000011A01	Pancasila	2
2	25020311C05	Pengantar Hukum Indonesia	2
3	25000011B01	Bahasa Arab Dasar	2
4	25000011B02	Struktur dan Kosakata Bahasa Arab	2
5	25000011B07	Filsafat Ilmu	2
6	25000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2
7	25000011B10	Studi Al'Quran dan Al' Hadist	2
8	25000011B11	Studi Fiqh	2
9	25020311C04	Pengantar Ilmu Hukum	2
10	25020311E19	Ilmu Negara	2
Jumlah			20

Semester 2

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	24000011A02	Kewarganegaraan	2
2	25000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2
3	25000011B04	Bahasa Arab Praktis	2
4	25020311C01	Ulumul Qur'an dan Tafsir Ahkam	2
5	25020311E01	Ulumul Hadist	2
6	25020311C02	Ushul Fiqh	3
7	24000011A03	Bahasa Indonesia	2
8	25020311E25	Siyasah Dusturiyah	2
9	25020311E33	Filsafat Logika	2
10	25020311C03	Fiqh Ibadah	2
Jumlah			21

Semester 3

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	25000011B05	Bahasa Inggris Umum	3
2	25020311E30	Hukum Internasional	2
3	25000011B09	Teosofi	2
4	25020311E06	Qawaid Fiqh Siyasah	2
5	25020311E37	Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan	2
6	25020311E11	Hukum Agraria	2
7	25020311E27	Siyasah Maliyah	2
8	25020311C06	Hukum Tata Negara	2
9	25020311E24	Hukum Administrasi Negara	2
10	25020311E10	Peradilan Agama Di Indonesia	2
11	25020311E03	Fiqh Mawaris	2
Jumlah			23

Semester 4

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	25000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3
2	25020311E34	Hukum Perjanjian Internasional	2
3		Hukum Keuangan Negara	2
4	25020311E07	Hadist Ahkam Siyasah	2
5	25020311E13	Hukum Acara PTUN	2
6	25020311E18	Hukum Lembaga Negara	2
7	250203110E12	Metodologi Penelitian hukum	3
8	25020311E05	Hukum Pidana	2
9	25020311E06	Hukum Perdata	2
10	25020311E21	Hukum Konstitusi	2
11	25020311E23	Ilmu Perundang-Undangan	2
Jumlah			24

Semester 5

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	25020311E35	Hukum Ketenagakerjaan	2
2	25020311E17	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	2
3	25020311E36	Teknik Perancangan Perundang-undangan	2
4	25020311E14	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
5	25020311E26	Siyasah Dauliyah	2
6	25020311E15	Sosiologi Hukum	2
7	25020311E22	Politik Hukum	2
8	25020311E09	Hukum Acara Perdata	2
9	25020311E08	Hukum Acara Pidana	2
10	25020311E38	Hukum Pemerintahan Daerah	2
11	25020311E16	Syariah dan HAM	2
12	25020311E40	Hukum Pemilu dan Parpol	2
Jumlah			24

Semester 6

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	25020311E39	Hukum Kebijakan Publik	2
2	25020311E20	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
3	25020311E29	Etika Profesi Hukum	2
4	25020311E41	Legal Opinion	2
5	25020311B12	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
6	25020311E42	Ilmu Politik	2
		MK Pilihan	
1	25020312E03	Praktek Kemahiran Hukum	10
2	25020312E04	Etika Politik Dalam Islam	
3	25020312E05	Hukum Lingkungan	
4	25020312E06	Teknik Perancangan Kontrak	
5	25020312E07	Hukum Adat	
6	25020312E01	Fiqh Munakahah	
7	25020311E02	Fiqh Muamalah	

8	25020312E02	Ilmu Falak	
9	25020312E10	Hukum Keimigrasian	
Jumlah			22

Semester 7

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	20020311E28	PKL	4
2		sempro	0
3	25020311E31	kompre	2
4	25020311E32	TAS	6
Jumlah			12

STRUKTUR KURIKULUM

Dokumen ini merupakan adaptasi dari kerangka penyusunan bagian "Strategi Pembelajaran, Sumber Belajar, dan Prosedur Asesmen Mata Kuliah" sebagaimana terdapat pada Dokumen Kurikulum OBE Program Studi Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang disesuaikan sepenuhnya dengan karakteristik keilmuan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan struktur mata kuliah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor 94 Tahun 2025.

1. DESKRIPSI DAN MATERI KAJIAN MATA KULIAH

Deskripsi dan materi kajian setiap mata kuliah pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Malang secara lengkap disajikan pada Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Syariah dan Module Handbook (RPS) masing-masing mata kuliah. Berikut disajikan tiga contoh deskripsi dan materi kajian mata kuliah yang mewakili rumpun keilmuan Hukum Tata Negara positif, Fiqh Siyasah, dan keterampilan perancangan hukum.

Contoh 1 — Rumpun Hukum Tata Negara & Konstitusi (BK 03)

25020311C06	Hukum Tata Negara — 2 SKS
Deskripsi Mata Kuliah	Mempelajari dan menganalisis konsep dasar negara, kedaulatan, konstitusi, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta hubungan antarlembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Bahan Kajian	1. Konsep negara, unsur negara, dan teori kedaulatan 2. Konstitusi dan konstusionalisme di Indonesia 3. Sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan (trias politica) 4. Lembaga-lembaga negara pasca-amandemen UUD 1945 5. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CO)	CO1. menjelaskan konsep dasar negara, kedaulatan, dan konstitusi secara komprehensif; CO2. menganalisis kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945; CO3. mengevaluasi dinamika hubungan antarlembaga negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia; CO4. menyusun kajian tertulis atas suatu isu ketatanegaraan aktual secara sistematis dan berbasis sumber hukum yang sah.

Contoh 2 — Rumpun Fiqh Siyasah / HTN Islam (BK 05)

25020311E25	Siyasah Dusturiyah — 2 SKS
Deskripsi Mata Kuliah	Mempelajari konsep dasar dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah dusturiyah), meliputi konsep imamah/khilafah, ahlul halli wal aqdi, bai'at, syura, serta relevansinya dengan sistem ketatanegaraan modern.
Bahan Kajian	1. Pengertian dan ruang lingkup siyasah dusturiyah 2. Konsep imamah, khilafah, dan bai'at dalam fiqh siyasah 3. Konsep syura dan ahlul halli wal aqdi

	4. Perbandingan prinsip fiqh siyasah dusturiyah dengan konstitusionalisme modern 5. Aktualisasi nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam ketatanegaraan Indonesia
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CO)	CO1. menjelaskan konsep dan sumber hukum siyasah dusturiyah; CO2. menganalisis prinsip syura dan ahlul halli wal aqdi serta relevansinya dengan demokrasi modern; CO3. membandingkan konsep ketatanegaraan Islam klasik dengan sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer; CO4. menyajikan hasil kajian komparatif secara lisan dan tertulis dengan argumentasi yang runtut.

Contoh 3 — Rumpun Perancangan Hukum / Legal Drafting (BK 06)

25020311E36	Teknik Perancangan Perundang-Undangan — 2 SKS
Deskripsi Mata Kuliah	Mempelajari dan mempraktikkan teknik penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan daerah) sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Bahan Kajian	1. Asas dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Penyusunan naskah akademik 3. Teknik penyusunan batang tubuh dan sistematika peraturan 4. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi 5. Simulasi penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CO)	CO1. menjelaskan asas dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; CO2. menyusun naskah akademik sesuai kaidah penulisan ilmiah dan teknik perundang-undangan; CO3. merancang batang tubuh peraturan perundang-undangan secara sistematis dan tepat asas; CO4. mempresentasikan dan mempertahankan hasil rancangan peraturan dalam forum simulasi legislasi.

2. STRATEGI PEMBELAJARAN

Strategi pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) menerapkan metode pembelajaran yang dipilih oleh dosen pengampu mata kuliah, disepakati pada tingkat konsorsium keilmuan (rumpun Hukum Tata Negara & Konstitusi, rumpun Fiqh Siyasah, rumpun Hukum Administrasi & Tata Kelola, dan rumpun Keterampilan Hukum), serta diketahui oleh Program Studi. Strategi ini diarahkan untuk mencapai kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum maupun khusus) mahasiswa dalam proses belajar. Secara garis besar, metode pembelajaran dilakukan melalui 10 (sepuluh) metode yang didefinisikan sebagai M-i, $i = 1, 2, \dots, 10$, dengan rincian sebagai berikut.

1. (M-1) Metode Kuliah Interaktif

Dosen memberikan konsep dan asas hukum dasar yang harus dikuasai mahasiswa, mengeksplorasi keterkaitan dengan mata kuliah prasyarat, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi belajar mandiri. Metode ini banyak digunakan pada mata kuliah yang menekankan penguasaan teori dan asas hukum, seperti Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara.

2. (M-2) Metode Diskusi Kelompok

Dilaksanakan untuk melatih mahasiswa berkolaborasi, berargumentasi secara hukum (legal reasoning), dan menghargai perbedaan pendapat dalam menganalisis isu ketatanegaraan. Metode ini banyak diterapkan pada mata kuliah yang membutuhkan kemampuan analisis kasus dan kepekaan sosial-politik.

3. (M-3) Metode Studi Kasus dan Studi Literatur (Case Method)

Mahasiswa mengembangkan pengetahuannya melalui telaah putusan pengadilan, produk perundang-undangan, dan literatur hukum, kemudian menerapkannya pada pemecahan masalah ketatanegaraan riil. Metode ini banyak digunakan pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Konstitusi.

4. (M-4) Metode Pembelajaran Kolaboratif

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kerja tim lintas topik hukum, menemukan solusi hukum yang inovatif, serta melatih mahasiswa bekerja dalam kelompok yang heterogen. Metode ini banyak diterapkan pada mata kuliah perancangan hukum dan legal opinion.

5. (M-5) Metode Praktikum (Klinik Hukum/Moot Court)

Diarahkan pada pencapaian kemampuan psikomotorik dan keterampilan beracara. Praktikum dilaksanakan di ruang moot court atau klinik konsultasi hukum, baik secara mandiri maupun berkelompok berbasis simulasi kasus, meliputi penyusunan berkas, simulasi persidangan, dan penyusunan laporan.

6. (M-6) Metode Seminar dan Skripsi

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi ilmiah atas gagasan hukum secara lisan dan tertulis di hadapan forum, serta kemampuan merancang metode penelitian hukum. Metode ini digunakan pada mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Seminar Proposal, dan Tugas Akhir Studi.

7. (M-7) Metode Kajian Mandiri

Bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis secara mandiri dalam menelaah bahan hukum serta mengambil inisiatif riset. Metode ini digunakan hampir pada seluruh mata kuliah sebagai bagian dari kegiatan mandiri terstruktur.

8. (M-8) Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Mahasiswa dihadapkan pada permasalahan ketatanegaraan nyata (sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa pemilu, dan lain-lain) untuk dipecahkan secara sistematis berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

9. (M-9) Metode Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)

Mahasiswa menyelesaikan proyek nyata berupa penyusunan naskah akademik, rancangan peraturan, kontrak, atau legal opinion sebagai luaran akhir pembelajaran.

10. (M-10) Metode Pengabdian Masyarakat dan Praktik Lapangan

Bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa mengaplikasikan ilmu hukum tata negara di tengah masyarakat, mendorong kepekaan terhadap persoalan tata kelola pemerintahan riil, melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).

Pelaksanaan metode pembelajaran di atas didukung fasilitas berupa ruang kelas dengan kapasitas maksimal 40 mahasiswa per kelas, ruang moot court (peradilan semu), klinik

konsultasi hukum, LCD proyektor, koneksi internet Wi-Fi, sistem informasi akademik (SIAKAD), platform e-learning, akses pangkalan data hukum (JDIH, legal database, jurnal internasional), serta penerangan dan sarana pendukung lain yang memadai.

Pemetaan Mata Kuliah Berdasarkan PLO yang Dibebankan dan Strategi Pembelajaran

Tabel berikut menyajikan pemetaan seluruh mata kuliah pada struktur kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL/PLO) yang dibebankan serta strategi pembelajaran (M-1 s.d. M-10) yang diterapkan.

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	PLO yang Dibebankan	Strategi Pembelajaran
1	24000011A01	Pancasila	2	CPL01, CPL02, CPL13	M-1, M-2, M-7
2	25020311C05	Pengantar Hukum Indonesia	2	CPL04, CPL11, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7
3	25000011B01	Bahasa Arab Dasar	2	CPL03, CPL06	M-1, M-2, M-7
4	25000011B02	Struktur dan Kosakata Bahasa Arab	2	CPL03, CPL06	M-1, M-2, M-7
5	25000011B07	Filsafat Ilmu	2	CPL02, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
6	25000011B08	Sejarah Peradaban Islam	2	CPL01, CPL02, CPL13	M-1, M-3, M-7
7	25000011B10	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadist	2	CPL01, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
8	25000011B11	Studi Fiqh	2	CPL01, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
9	25020311C04	Pengantar Ilmu Hukum	2	CPL04, CPL11, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7
10	25020311E19	Ilmu Negara	2	CPL04, CPL11, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7
11	24000011A02	Kewarganegaraan	2	CPL01, CPL02, CPL13	M-1, M-2, M-7
12	25000011B03	Bahasa Arab Komunikatif	2	CPL03, CPL06	M-1, M-2, M-7
13	25000011B04	Bahasa Arab Praktis	2	CPL03, CPL06	M-1, M-2, M-7
14	25020311C01	Ulumul Qur'an dan Tafsir Ahkam	2	CPL01, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
15	25020311E01	Ulumul Hadist	2	CPL01, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
16	25020311C02	Ushul Fiqh	3	CPL03, CPL04, CPL12	M-1, M-2, M-3, M-7
17	24000011A03	Bahasa Indonesia	2	CPL03, CPL06, CPL13	M-1, M-2, M-7
18	25020311E25	Siyasah Dusturiyah	2	CPL01, CPL08, CPL11, CPL12	M-1, M-2, M-3, M-7
19	25020311E33	Filsafat Logika	2	CPL02, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
20	25020311C03	Fiqh Ibadah	2	CPL01, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
21	25000011B05	Bahasa Inggris Umum	3	CPL03, CPL06	M-1, M-2, M-7
22	25020311E30	Hukum Internasional	2	CPL04, CPL08, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7
23	25000011B09	Teosofi	2	CPL01, CPL02, CPL12	M-1, M-2, M-7
24	25020311E06	Qawaid Fiqh Siyasah	2	CPL01, CPL08, CPL12	M-1, M-2, M-3, M-7
25	25020311E37	Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan	2	CPL08, CPL11, CPL12	M-1, M-2, M-3, M-7
26	25020311E11	Hukum Agraria	2	CPL03, CPL04, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7
27	25020311E27	Siyasah Maliyah	2	CPL01, CPL08, CPL11, CPL12	M-1, M-2, M-3, M-7
28	25020311C06	Hukum Tata Negara	2	CPL04, CPL08, CPL09, CPL11, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7, M-8
29	25020311E24	Hukum Administrasi Negara	2	CPL04, CPL08, CPL09, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7, M-8

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	PLO yang Dibebankan	Strategi Pembelajaran
30	25020311E10	Peradilan Agama di Indonesia	2	CPL04, CPL07, CPL09, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-5, M-8
31	25020311E03	Fiqh Mawaris	2	CPL01, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
32	25000011B06	Bahasa Inggris Akademik	3	CPL03, CPL06	M-1, M-2, M-7
33	25020311E34	Hukum Perjanjian Internasional	2	CPL04, CPL08, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7
34	25020311E-HKN	Hukum Keuangan Negara	2	CPL04, CPL08, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7
35	25020311E07	Hadist Ahkam Siyasah	2	CPL01, CPL08, CPL12	M-1, M-2, M-3, M-7
36	25020311E13	Hukum Acara PTUN	2	CPL04, CPL07, CPL09, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-5, M-8
37	25020311E18	Hukum Lembaga Negara	2	CPL04, CPL08, CPL09, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7, M-8
38	250203110E12	Metodologi Penelitian Hukum	3	CPL04, CPL05, CPL06, CPL12	M-1, M-2, M-6, M-7
39	25020311E05	Hukum Pidana	2	CPL03, CPL04, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7
40	25020311E06b	Hukum Perdata	2	CPL03, CPL04, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7
41	25020311E21	Hukum Konstitusi	2	CPL04, CPL08, CPL09, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7, M-8
42	25020311E23	Ilmu Perundang-Undangan	2	CPL04, CPL08, CPL09	M-1, M-2, M-3, M-7, M-8
43	25020311E35	Hukum Ketenagakerjaan	2	CPL03, CPL04, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7
44	25020311E17	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	2	CPL01, CPL08, CPL12	M-1, M-2, M-3, M-7
45	25020311E36	Teknik Perancangan Perundang-Undangan	2	CPL04, CPL05, CPL09	M-1, M-4, M-5, M-9
46	25020311E14	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	CPL04, CPL07, CPL09, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-5, M-8
47	25020311E26	Siyasah Dauliyah	2	CPL01, CPL08, CPL11, CPL12	M-1, M-2, M-3, M-7
48	25020311E15	Sosiologi Hukum	2	CPL04, CPL08, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7
49	25020311E22	Politik Hukum	2	CPL04, CPL08, CPL09	M-1, M-2, M-3, M-7, M-8
50	25020311E09	Hukum Acara Perdata	2	CPL04, CPL07, CPL09, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-5, M-8
51	25020311E08	Hukum Acara Pidana	2	CPL04, CPL07, CPL09, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-5, M-8
52	25020311E38	Hukum Pemerintahan Daerah	2	CPL04, CPL08, CPL09	M-1, M-2, M-3, M-7, M-8
53	25020311E16	Syariah dan HAM	2	CPL01, CPL04, CPL08, CPL12	M-1, M-2, M-3, M-7
54	25020311E40	Hukum Pemilu dan Partai Politik	2	CPL04, CPL08, CPL09	M-1, M-2, M-3, M-7, M-8
55	25020311E39	Hukum Kebijakan Publik	2	CPL04, CPL08, CPL09	M-1, M-2, M-3, M-7, M-8
56	25020311E20	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	CPL04, CPL08, CPL11, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	PLO yang Dibebankan	Strategi Pembelajaran
57	25020311E29	Etika Profesi Hukum	2	CPL01, CPL02, CPL03, CPL10	M-1, M-2, M-7
58	25020311E41	Legal Opinion	2	CPL04, CPL07, CPL09, CPL10	M-2, M-3, M-4, M-8, M-9
59	25020311B12	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2	CPL02, CPL03, CPL10	M-2, M-5, M-7, M-10
60	25020311E42	Ilmu Politik	2	CPL04, CPL08, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7
61	25020312E03	Praktek Kemahiran Hukum (Pilihan)	2	CPL07, CPL09, CPL10	M-4, M-5, M-8, M-9, M-10
62	25020312E04	Etika Politik dalam Islam (Pilihan)	2	CPL01, CPL08, CPL12	M-1, M-2, M-7
63	25020312E05	Hukum Lingkungan (Pilihan)	2	CPL03, CPL04, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7
64	25020312E06	Teknik Perancangan Kontrak (Pilihan)	2	CPL04, CPL05, CPL09	M-1, M-4, M-5, M-9
65	25020312E07	Hukum Adat (Pilihan)	2	CPL03, CPL04, CPL11	M-1, M-2, M-3, M-7
66	25020312E01	Fiqh Munakahah (Pilihan)	2	CPL01, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
67	25020311E02	Fiqh Muamalah (Pilihan)	2	CPL01, CPL03, CPL12	M-1, M-2, M-7
68	25020312E02	Ilmu Falak (Pilihan)	2	CPL11, CPL12, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7
69	25020312E10	Hukum Keimigrasian (Pilihan)	2	CPL04, CPL08, CPL13	M-1, M-2, M-3, M-7
70	20020311E28	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	4	CPL03, CPL07, CPL09, CPL10	M-5, M-9, M-10
71	-	Seminar Proposal (Sempro)	0	CPL04, CPL05, CPL06	M-6, M-7
72	25020311E31	Ujian Komprehensif	2	CPL04, CPL08, CPL09, CPL11, CPL12	M-7
73	25020311E32	Tugas Akhir Studi (TAS)/Skripsi	6	CPL04, CPL05, CPL06, CPL09, CPL10, CPL12	M-6, M-7

3. SUMBER BELAJAR

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disediakan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, baik cetakan (buku teks, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab-kitab fiqh siyasah), maupun elektronik (e-book, jurnal ilmiah, e-court, JDIH, dan basis data hukum), yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk mendukung proses pembelajaran sebagai perwujudan kurikulum. Sumber belajar dapat diakses secara luring di Perpustakaan Pusat UIN Malang dan Ruang Baca Fakultas Syariah, atau secara daring melalui laman <https://library.uin-malang.ac.id>, portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta laman resmi lembaga peradilan dan legislasi (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan DPR RI) yang relevan dengan materi perkuliahan.

4. PROSEDUR ASESMEN MATA KULIAH

Pelaksanaan mata kuliah oleh dosen pengampu diselenggarakan melalui mekanisme evaluasi hasil pembelajaran yang diuraikan sebagai berikut.

1) Merencanakan Asesmen

Sebelum pelaksanaan mata kuliah, dosen pengampu merencanakan evaluasi hasil pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Course Outcome/CO). Rencana evaluasi

meliputi penentuan teknik evaluasi (ujian tertulis, analisis kasus, legal opinion, simulasi persidangan, penyusunan rancangan peraturan), instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian pada setiap mata kuliah, dengan memperhatikan catatan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembelajaran pada semester sebelumnya. Rencana evaluasi diunggah melalui laman program studi dan e-learning agar mudah diakses mahasiswa.

2) Menentukan Alat Asesmen yang Tepat

Di akhir pelaksanaan mata kuliah, Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi melaksanakan analisis Indeks Kepuasan Mata Kuliah (IKM) berdasarkan respons mahasiswa terkait ketercapaian CO dan CPL, kepuasan penyelenggaraan perkuliahan, performa dosen, serta masukan mahasiswa. Hasil IKM digunakan sebagai acuan penyusunan atau revisi rencana evaluasi yang disosialisasikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan.

3) Melaksanakan Asesmen

Rencana evaluasi yang telah difinalisasi bersama mahasiswa dilaksanakan secara konsisten sepanjang satu semester, meliputi tugas terstruktur, kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), serta penilaian berbasis kinerja (performance-based assessment) seperti simulasi peradilan semu (moot court), lokakarya legal drafting, penyusunan legal opinion, dan audit hukum, sesuai karakteristik masing-masing mata kuliah.

4) Mengevaluasi Hasil Asesmen

Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi antara dosen mata kuliah, konsorsium rumpun keilmuan, dan program studi, dengan memperhatikan umpan balik mahasiswa. Dokumen rencana evaluasi memuat model evaluasi dan jadwal pelaksanaannya.

5) Memberikan Umpan Balik

Dosen bertanggung jawab memberikan umpan balik atas hasil evaluasi tugas, kuis, UTS, dan UAS, termasuk umpan balik atas hasil praktik (simulasi persidangan, rancangan peraturan, legal opinion), sehingga mahasiswa dapat merefleksikan capaian pembelajarannya dan melakukan perbaikan pada mata kuliah yang sama maupun mata kuliah berikutnya.

6) Perbaikan Asesmen

Dosen melakukan evaluasi hasil pembelajaran berdasarkan capaian kinerja mahasiswa, menyusun catatan refleksi sebagai bahan perbaikan rencana pembelajaran dan strategi evaluasi pada semester berikutnya.

7) Pendokumentasian Hasil Asesmen

Dokumen hasil pembelajaran dan asesmen diinventarisasi oleh dosen dan dibagikan secara transparan kepada mahasiswa melalui SIAKAD, sebagai bukti autentik pelaksanaan pembelajaran dan bahan penyusunan evaluasi pembelajaran selanjutnya.

Penilaian akhir dikonversi menjadi nilai huruf mengikuti ketentuan konversi nilai yang berlaku pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), yaitu rentang 85–100 (A), 75–<85 (B+), 70–<75 (B), 65–<70 (C+), 60–<65 (C), 50–<60 (D, tidak lulus), dan 0–<50 (E, tidak lulus), sebagaimana telah ditetapkan pada Pedoman Akademik Fakultas Syariah.

Pemetaan Mata Kuliah Berdasarkan Strategi Asesmen

Tabel berikut menyajikan pemetaan bentuk/strategi asesmen pada setiap mata kuliah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang meliputi kategori Ujian (tertulis/lisan atas penguasaan teori dan asas hukum), Analisis (analisis kasus/putusan/regulasi), Presentasi,

Simulasi (moot court/praktik peradilan), Proyek (legal drafting, legal opinion, penelitian), dan Khusus (portofolio, penilaian sikap/etika, ujian komprehensif, dan penilaian PKL/KKM).

No	Mata Kuliah	Ujian	Analisis	Presentasi	Simulasi	Proyek	Khusus
1	Pancasila	✓		✓			
2	Pengantar Hukum Indonesia	✓	✓				
3	Bahasa Arab Dasar	✓			✓		
4	Struktur dan Kosakata Bahasa Arab	✓		✓			
5	Filsafat Ilmu	✓	✓				
6	Sejarah Peradaban Islam	✓	✓	✓			
7	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadist	✓	✓				
8	Studi Fiqh	✓	✓				
9	Pengantar Ilmu Hukum	✓	✓				
10	Ilmu Negara	✓	✓	✓			
11	Kewarganegaraan	✓		✓			
12	Bahasa Arab Komunikatif	✓			✓		
13	Bahasa Arab Praktis	✓			✓		
14	Ulumul Qur'an dan Tafsir Ahkam	✓	✓				
15	Ulumul Hadist	✓	✓				
16	Ushul Fiqh	✓	✓				
17	Bahasa Indonesia	✓		✓			
18	Siyasah Dusturiyah	✓	✓	✓			
19	Filsafat Logika	✓	✓				
20	Fiqh Ibadah	✓	✓				
21	Bahasa Inggris Umum	✓			✓		
22	Hukum Internasional	✓	✓				
23	Teosofi	✓	✓				
24	Qawaid Fiqh Siyasah	✓	✓				
25	Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan	✓	✓	✓			
26	Hukum Agraria	✓	✓				
27	Siyasah Maliyah	✓	✓	✓			
28	Hukum Tata Negara	✓	✓	✓			
29	Hukum Administrasi Negara	✓	✓				
30	Peradilan Agama di Indonesia	✓	✓		✓		
31	Fiqh Mawaris	✓	✓				
32	Bahasa Inggris Akademik	✓		✓			
33	Hukum Perjanjian Internasional	✓	✓				
34	Hukum Keuangan Negara	✓	✓				
35	Hadist Ahkam Siyasah	✓	✓				
36	Hukum Acara PTUN	✓	✓		✓		
37	Hukum Lembaga Negara	✓	✓				
38	Metodologi Penelitian Hukum		✓	✓		✓	
39	Hukum Pidana	✓	✓				

No	Mata Kuliah	Ujian	Analisis	Presentasi	Simulasi	Proyek	Khusus
40	Hukum Perdata	✓	✓				
41	Hukum Konstitusi	✓	✓	✓			
42	Ilmu Perundang-Undangan	✓	✓				
43	Hukum Ketenagakerjaan	✓	✓				
44	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	✓	✓	✓			
45	Teknik Perancangan Perundang-Undangan		✓		✓	✓	
46	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	✓	✓		✓		
47	Siyasah Dauliyah	✓	✓	✓			
48	Sosiologi Hukum	✓	✓				
49	Politik Hukum	✓	✓				
50	Hukum Acara Perdata	✓	✓		✓		
51	Hukum Acara Pidana	✓	✓		✓		
52	Hukum Pemerintahan Daerah	✓	✓				
53	Syariah dan HAM	✓	✓	✓			
54	Hukum Pemilu dan Partai Politik	✓	✓				
55	Hukum Kebijakan Publik	✓	✓	✓			
56	Perbandingan Hukum Tata Negara	✓	✓	✓			
57	Etika Profesi Hukum	✓		✓			✓
58	Legal Opinion		✓	✓		✓	
59	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)				✓	✓	✓
60	Ilmu Politik	✓	✓				
61	Praktek Kemahiran Hukum (Pilihan)				✓	✓	✓
62	Etika Politik dalam Islam (Pilihan)	✓	✓				
63	Hukum Lingkungan (Pilihan)	✓	✓				
64	Teknik Perancangan Kontrak (Pilihan)		✓		✓	✓	
65	Hukum Adat (Pilihan)	✓	✓				
66	Fiqh Munakahah (Pilihan)	✓	✓				
67	Fiqh Muamalah (Pilihan)	✓	✓				
68	Ilmu Falak (Pilihan)	✓	✓				
69	Hukum Keimigrasian (Pilihan)	✓	✓				
70	Praktik Kerja Lapangan (PKL)				✓	✓	✓
71	Seminar Proposal (Sempro)			✓			✓
72	Ujian Komprehensif	✓					✓
73	Tugas Akhir Studi (TAS)/Skripsi		✓	✓		✓	✓

Keterangan: PLO/CPL 01–13 mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kurikulum induk (Bagian III Rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi). Dokumen ini bersifat sebagai

kerangka acuan bagi dosen pengampu dan konsorsium rumpun keilmuan dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Module Handbook masing-masing mata kuliah, dan akan ditinjau secara berkala melalui mekanisme evaluasi kurikulum, tracer study, dan umpan balik pemangku kepentingan.

**PANDUAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)**

Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

Dalam rangka proses pembelajaran, dosen harus membuat rencana pembelajaran semester untuk pedoman mengajar dalam satu semester. Penyusunan RPS diatur sebagai berikut.

1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
2. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian (konsorsium) tertentu.
3. RPS minimal memuat:
 - Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
 - Capaian pembelajaran lulusan (PLO) yang dibebankan pada mata kuliah.
 - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi PLO.
 - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
 - Materi kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
 - Metode pembelajaran.
 - Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
 - Daftar referensi yang digunakan.
4. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pencapaian PLO.
6. Untuk mendukung tercapainya PLO PS, setiap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CO) dikaitkan dengan PLO yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Keterkaitan ini dijelaskan dalam RPS setiap mata kuliah.
7. RPS yang telah disusun oleh tim dosen pada kelompok konsorsium tertentu diverifikasi oleh UPM PS HTN (Siyasah) untuk menjamin bahwa RPS telah memuat hal-hal yang disebutkan di atas. Selanjutnya, RPS disahkan oleh Ketua PS.

Sub Capaian Pembelajaran dan Indikator Kinerja

Sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub CO) merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang dijabarkan dari CO. Pada mata kuliah dasar, pada umumnya sub capaian pembelajarannya adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami dan menjelaskan secara tepat konsep HTN (Siyasah) yang diberikan pada perkuliahan, serta memahami pentingnya konsep yang dipelajari sebagai bekal mengikuti mata kuliah selanjutnya.

Pada mata kuliah lanjut, selain mampu menjelaskan konsep HTN (Siyasah) secara tepat, sub CPL yang ditetapkan adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep HTN (Siyasah) yang dipelajari untuk

menyelesaikan masalah nyata, mulai dari masalah yang sederhana hingga yang lebih kompleks, baik secara manual maupun dengan bantuan piranti perangkat lunak HTN (Siyasah).

Untuk mengukur ketercapaian setiap sub CO digunakan indikator kinerja berupa instrumen penilaian yang meliputi pretest, post test, kuis, tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester, proyek akhir, seminar proposal skripsi, seminar hasil skripsi, dan ujian akhir skripsi. Setiap komponen penilaian pada instrumen tersebut disusun dengan mengacu kepada sub CPL yang telah ditetapkan, seperti diberikan pada Lampiran 4.

Indikator Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Indikator sub capaian pembelajaran merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja dari sub capaian pembelajaran mata kuliah yang telah disusun. Indikator keberhasilan dalam mencapai sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menuliskan kembali definisi.
- b. Membuktikan sifat-sifat yang terkait dengan materi pembelajaran mata kuliah.
- c. Mampu memberikan contoh lain terkait materi pembelajaran yang telah dibahas.
- d. Menganalisis dan menentukan solusi dari suatu masalah menggunakan pemahaman dari materi pembelajaran yang telah disampaikan.
- e. Memiliki pemahaman, kelengkapan, kebenaran penjelasan, ketepatan, dan ketelitian terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan.
- f. Mampu menyampaikan presentasi yang menarik dan tepat sesuai dengan materi pembelajaran mata kuliah.

Kriteria dan Bentuk Penilaian

Berdasarkan sistem pembelajaran berbasis student center learning, hasil pembelajaran sangat ditentukan oleh partisipasi aktif mahasiswa dalam setiap pertemuan, baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk itu, penilaian hasil belajar diperoleh dari penilaian proses dan penilaian kinerja.

Penilaian berupa nilai akhir yang dikonversi menjadi nilai huruf dengan aturan yang diberikan pada Tabel Konversi Nilai Akhir. Kriteria penilaian merupakan standar keberhasilan mahasiswa yang dapat dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dan nilai akhir. Nilai akhir diperoleh dengan cara menggabungkan nilai pada komponen tugas, kuis, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Masing-masing komponen tersebut diberi penilaian dengan cara pembobotan yang telah ditetapkan dalam RPS.

Konversi Nilai Akhir Angka menjadi Nilai Huruf serta Kriteria Penilaian

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf	Bobot	Nilai Akhir Keterangan
$85 \leq NA \leq 100$	A	4	Lulus
$75 \leq NA < 85$	B+	3,5	Lulus
$70 \leq NA < 75$	B	3	Lulus
$65 \leq NA < 70$	C+	2,5	Lulus
$60 \leq NA < 65$	C	2	Lulus
$50 \leq NA < 60$	D	1	Tidak Lulus
$0 \leq NA < 50$	E	0	Tidak Lulus

Bentuk, Metode, dan Pengalaman Pembelajaran

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 14, dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan, diperlukan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Beberapa metode pembelajaran yang digunakan di Program Studi HTN (Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Diskusi kelompok
2. Simulasi
3. Studi kasus
4. Pembelajaran kolaboratif
5. Pembelajaran kooperatif
6. Pembelajaran berbasis proyek
7. Pembelajaran berbasis masalah

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang kemudian diwadahi dalam bentuk pembelajaran sebagai berikut.

1. Kuliah

Bentuk pembelajaran ini dihitung dengan satuan beban belajar SKS (Satuan Kredit Semester). 1 SKS terdiri atas:

- Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Dalam kegiatan proses belajar, perkuliahan ini melibatkan dosen sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran serta mahasiswa sebagai pihak pembelajar yang bertemu dalam satu ruangan, baik secara luring maupun secara daring. Setelah dilaksanakan kegiatan proses belajar, dosen memberikan tugas terstruktur. Setelah itu, barulah mahasiswa belajar secara mandiri.

2. Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan

Bentuk pembelajaran ini dilaksanakan utamanya pada mata kuliah skripsi. Selain itu, terdapat beberapa mata kuliah yang juga menggunakan bentuk pembelajaran ini, seperti metode penelitian dan kapita selekta. Pembelajaran ini dilaksanakan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan.

3. Seminar

Bentuk perkuliahan ini merupakan rangkaian dari mata kuliah skripsi. Seminar yang harus ditempuh oleh mahasiswa terdiri atas seminar proposal, seminar hasil, dan sidang skripsi.

4. Praktikum

Pada Kurikulum 2025, Program Studi HTN (Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membuka mata kuliah khusus praktikum yang berkaitan dengan penerapan hukum acara/praktek peradilan serta pembuatan peraturan perundang-undangan. Bentuk pembelajaran praktikum akan diterapkan bersamaan dengan penyampaian teori. Bentuk perkuliahan ini hanya ada pada beberapa mata kuliah yang memang membutuhkan praktikum, seperti Hukum Perdata, Pidana, PTUN, MK dan Mata kuliah ilmu/teknik peraturan perundang-undangan.

5. Magang / PKL (Praktik Kerja Lapangan)

Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk pembelajaran berupa praktik langsung di lapangan untuk memperoleh pengalaman langsung berinteraksi dengan industri pengguna lulusan.

6. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

KKN adalah program pengabdian masyarakat yang diwajibkan bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di dalam kelas dalam konteks kehidupan nyata. Tujuan utama dari mata kuliah KKN adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat, serta mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Melalui program KKN, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan teori dan praktik secara efektif, meningkatkan kepekaan sosial, dan mengembangkan sikap tanggung jawab serta kepedulian terhadap masyarakat.

Rancangan Suasana Akademik Implementasi RPS

Kebijakan mengenai organisasi dan tata kelola perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengarah pada penciptaan suasana akademik yang menciptakan manusia berkarakter ulul albab, yang memiliki empat kekuatan yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Keempat kekuatan tersebut dijabarkan dalam butir-butir indikator ulul albab yang tertuang dalam Statuta UIN Malang No. 15 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah direvisi dengan Statuta UIN Malang Tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Agama No. 40 Tahun 2018.

Kebijakan tersebut selanjutnya diuraikan lebih rinci dalam Buku Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Standar Mutu Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 (tautan dokumen tersedia pada arsip prodi). Pada bagian standar isi pembelajaran dan strategi pencapaian termaktub pada halaman 22–26. Sementara itu, standar proses pembelajaran dan strategi pencapaian termaktub pada halaman 74–79. Standar penilaian pembelajaran termaktub pada halaman 82–86. Standar pengelolaan dan strategi pencapaian termaktub pada halaman 110–118.

Selain itu, Fakultas Sains dan Teknologi menerbitkan pula Buku Pedoman Pendidikan Tahun 2022 (tautan dokumen tersedia pada arsip fakultas). Landasan program pendidikan termaktub dalam Pasal 12, standar penyelenggaraan pendidikan termaktub dalam Pasal 13, dan sistem pengelolaan pendidikan termaktub dalam Pasal 16.

Salah satu bentuk perwujudan otonomi keilmuan di PS HTN (Siyasah) UIN Malang adalah kebebasan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan penelitian, yang diatur dalam Standar SPMI 2020 pada Bab III halaman 128. Sementara itu, aktivitas pengabdian kepada masyarakat termaktub pada Bab IV halaman 168.

Dosen PS HTN (Siyasah) UIN Malang diwadahi secara keilmuan di dalam konsorsium untuk mengembangkan keilmuan sebidang, yakni: konsorsium aljabar, konsorsium HTN (Siyasah) terapan, konsorsium analisis, konsorsium statistika dan aktuaria, serta konsorsium komputasi dan pemrograman. Secara periodik, konsorsium menyelenggarakan kuliah tamu, placement test, dan seminar hasil penelitian dosen dalam bentuk webinar yang terdokumentasi pada laman resmi Program Studi HTN (Siyasah). Selain itu, konsorsium memiliki peran penting dalam penyusunan materi perkuliahan, evaluasi pembelajaran, dan peninjauan kurikulum.

Dalam proses belajar mengajar, dosen juga diberi keleluasaan untuk menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang berbasis pada Student Centered Learning dengan metode blended learning. Dosen juga difasilitasi untuk menyampaikan gagasan akademik di forum-forum ilmiah yang tersedia, baik dalam bentuk publikasi ilmiah pada seminar internasional Green Technology yang dilaksanakan setiap tahun, maupun seminar nasional Simanis yang dilaksanakan dua tahun sekali.

Untuk meningkatkan kompetensi dosen muda, UIN Malang mencanangkan pelatihan pedagogik yang diatur secara internal berdasarkan SK Rektor, pelatihan mengajar (PEKERTI) yang dilaksanakan dosen muda secara mandiri, workshop pengembangan kompetensi seperti SEAM School, beasiswa non-gelar LPDP Kemenag, dan studi lanjut.

Program Studi HTN (Siyasah) UIN Malang juga memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung kebebasan akademik bagi mahasiswa, antara lain:

- a. Workshop atau kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Prodi HTN (Siyasah) UIN Malang.

- b. Kebebasan untuk merencanakan studinya melalui sistem akademik SIAKAD, dengan bimbingan dosen penasihat akademik baik secara daring maupun luring.
- c. Mengekspresikan hasil pemikirannya dalam mimbar akademik, seperti pada kegiatan seminar proposal dan seminar hasil yang dilakukan secara terbuka.
- d. Program Kreativitas Mahasiswa Baru.
- e. Acara audiensi yang memungkinkan mahasiswa berdialog dengan pimpinan universitas untuk menyampaikan gagasan mengenai kebijakan universitas.
- f. Mengikuti dan menyelenggarakan berbagai kegiatan di Himpunan Mahasiswa HTN (Siyasah), SEMA, DEMAS, maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) lainnya.
- g. Keikutsertaan dalam berbagai ajang adu prestasi mahasiswa di berbagai lingkup, lomba debat, Karya Tulis Ilmiah (KTI), dan Peradilan semu
- h. Penggunaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti jaringan internet, ruang kelas, perpustakaan, klinik, koperasi, ma'had, masjid, dan UKM yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah.
- i. Kebebasan bagi mahasiswa untuk menentukan topik skripsi, tema KKN, dan PKL di bawah bimbingan dosen yang berkompeten dan konsorsium.

Seperti dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan di PS HTN (Siyasah) UIN Malang juga memperoleh berbagai keleluasaan untuk meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan atau kursus dan menjalankan studi lanjut. Selain itu, tenaga kependidikan juga diberi kebebasan untuk memanfaatkan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugasnya, seperti pelatihan LSP UIN Malang.

Portofolio Mata Kuliah

Di setiap akhir semester, setiap dosen memiliki mekanisme evaluasi diri atas prestasi mengajar dan prestasi mahasiswanya, yang dituangkan dalam bentuk portofolio untuk masing-masing kelas dan mata kuliah yang diampunya. Portofolio ini juga berisi evaluasi masukan dari mahasiswa yang selanjutnya menjadi bahan perbaikan untuk pembelajaran di semester selanjutnya.